LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN DESEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Desember pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Desember sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISPERKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 80.946.840.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 80.258.890.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 687.950.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Dipindai dengan CamScanner

Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**80.946.840.000**	**79.965.011.119**	**98,79**	**981.828.881**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**80.258.890.000**	**79.279.572.119**	**98,78**	**979.317.881**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.627.104.000	13.296.454.364	97,57	330.649.636
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.572.650.000	5.428.588.793	97,41	144.061.207
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.093.953.000	4.036.656.200	98,60	57.296.800
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.093.953.000**	**4.036.656.200**	**98,60**	**57.296.800**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	359.813.000	355.316.692	98,75	4.496.308
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**359.813.000**	**355.316.692**	**98,75**	**4.496.308**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	213.080.000	211.460.000	99,24	1.620.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**213.080.000**	**211.460.000**	**99,24**	**1.620.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.515.000	73.255.000	82,76	15.260.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**88.515.000**	**73.255.000**	**82,76**	**15.260.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	139.295.000	137.615.000	98,79	1.680.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**139.295.000**	**137.615.000**	**98,79**	**1.680.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	212.572.000	209.583.480	98,59	2.988.520
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**212.572.000**	**209.583.480**	**98,59**	**2.988.520**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.354.000	17.787.641	73,04	6.566.359
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**24.354.000**	**17.787.641**	**73,04**	**6.566.359**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	811.000	60.021	7,40	750.979
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**811.000**	**60.021**	**7,40**	**750.979**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	402.257.000	353.767.227	87,95	48.489.773
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**402.257.000**	**353.767.227**	**87,95**	**48.489.773**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.000.000	8.271.888	82,72	1.728.112
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**10.000.000**	**8.271.888**	**82,72**	**1.728.112**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.000.000	24.815.644	88,63	3.184.356
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**28.000.000**	**24.815.644**	**88,63**	**3.184.356**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.607.494.000	7.425.705.571	97,61	181.788.429
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.607.494.000	7.425.705.571	97,61	181.788.429
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**7.607.494.000**	**7.425.705.571**	**97,61**	**181.788.429**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	446.960.000	442.160.000	98,93	4.800.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	446.960.000	442.160.000	98,93	4.800.000
5.1.1.3.7.1	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**432.000.000**	**427.200.000**	**98,89**	**4.800.000**
5.1.1.3.7.2	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**14.960.000**	**14.960.000**	**100**	**0**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.744.283.000	22.311.315.615	98,10	432.967.385
5.1.2.1	Belanja Barang	4.637.870.000	4.615.164.595	99,51	22.705.405
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.637.870.000	4.615.164.595	99,51	22.705.405
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**310.856.000**	**310.747.100**	**99,96**	**108.900**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**7.650.000**	**7.000.000**	**91,50**	**650.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**48.000.000**	**47.911.224**	**99,82**	**88.776**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**409.998.000**	**408.243.380**	**99,57**	**1.754.620**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**384.492.000**	**383.849.900**	**99,83**	**642.100**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**23.850.000**	**23.850.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**45.000.000**	**44.864.000**	**99,70**	**136.000**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**20.550.000**	**20.550.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**1.577.372.000**	**1.577.369.491**	**100**	**2.509**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.807.102.000**	**1.787.779.500**	**98,93**	**19.322.500**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.407.289.000	9.102.703.079	96,76	304.585.921
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.941.159.000	7.646.208.226	96,29	294.950.774
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**813.850.000**	**749.250.000**	**92,06**	**64.600.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**5.310.105.000**	**5.289.180.000**	**99,61**	**20.925.000**
5.1.2.2.1.16	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**42.420.000**	**42.420.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.1.24	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**	**158.040.000**	**154.620.000**	**97,84**	**3.420.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.26	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**	**34.200.000**	**34.200.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**254.000.000**	**253.856.532**	**99,94**	**143.468**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**454.037.000**	**454.025.004**	**100**	**11.996**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**34.200.000**	**34.197.350**	**99,99**	**2.650**
5.1.2.2.1.39	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**	**184.407.000**	**184.407.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.1.47	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**	**6.300.000**	**6.000.000**	**95,24**	**300.000**
5.1.2.2.1.55	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**	**26.900.000**	**26.765.000**	**99,50**	**135.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**120.000.000**	**47.134.972**	**39,28**	**72.865.028**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**30.000.000**	**7.031.100**	**23,44**	**22.968.900**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**430.000.000**	**326.271.268**	**75,88**	**103.728.732**
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	**18.550.000**	**18.120.000**	**97,68**	**430.000**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**24.150.000**	**18.730.000**	**77,56**	**5.420.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	260.776.678	97,71	6.106.322
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	**105.444.000**	**103.207.658**	**97,88**	**2.236.342**
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	**5.078.000**	**4.401.976**	**86,69**	**676.024**
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	**6.361.000**	**5.531.648**	**86,96**	**829.352**
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**150.000.000**	**147.635.396**	**98,42**	**2.364.604**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.4.409	**Belanja Sewa Peralatan Personal Computer**	**37.500.000**	**37.500.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**75.700.000**	**75.700.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	504.203.000	504.200.725	100	2.275
5.1.2.2.8.2	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**	**242.162.000**	**242.162.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8.13	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya**	**39.209.000**	**39.209.000**	**100**	**0**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**39.183.000**	**39.183.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8.22	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**183.649.000**	**183.646.725**	**100**	**2.275**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	524.844.000	521.317.450	99,33	3.526.550
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**49.770.000**	**49.770.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**368.074.000**	**368.073.250**	**100**	**750**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**103.474.200**	**96,70**	**3.525.800**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	37.000.000	100	0
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**37.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	664.250.000	99,76	1.600.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	365.850.000	100	0
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**10.600.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**225.850.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**44.400.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**65.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	298.400.000	99,47	1.600.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**298.400.000**	**99,47**	**1.600.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.805.774.000	7.701.697.941	98,67	104.076.059
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.805.774.000	7.701.697.941	98,67	104.076.059
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.801.774.000**	**6.724.797.941**	**98,87**	**76.976.059**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.004.000.000**	**976.900.000**	**97,30**	**27.100.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	227.500.000	100	0
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	227.500.000	100	0
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**227.500.000**	**100**	**0**
5.1.5	Belanja Hibah	1.067.503.000	1.065.802.140	99,84	1.700.860
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.067.503.000	1.065.802.140	99,84	1.700.860
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	498.825.000	497.124.598	99,66	1.700.402
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**498.825.000**	**497.124.598**	**99,66**	**1.700.402**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	568.678.000	568.677.542	100	458
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**568.678.000**	**568.677.542**	**100**	**458**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.820.000.000	42.606.000.000	99,50	214.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.820.000.000	42.606.000.000	99,50	214.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.820.000.000	42.606.000.000	99,50	214.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.820.000.000**	**42.606.000.000**	**99,50**	**214.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**687.950.000**	**685.439.000**	**99,64**	**2.511.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.500.000	683.989.000	99,63	2.511.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	461.500.000	461.500.000	100	0
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	461.500.000	461.500.000	100	0
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**461.500.000**	**461.500.000**	**100**	**0**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**80.946.840.000**	**79.965.011.119**	**98,79**	**981.828.881**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(79.965.011.119)**	**100**	**79.965.011.119**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(79.965.011.119)**	**100**	**79.965.011.119**

Semarang, 31 Desember 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja Murni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.946.840.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 80.258.890.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 687.950.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Perubahan Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.627.104.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.296.454.364,- dengan Presentasi 97.57 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.744.283.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.311.315.615,- dengan Presentasi 98.10 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.820.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.606.000.000,- dengan Presentasi 99.50 %.

Dipindai dengan CamScanner

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 687.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 99.64 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 686.500.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 99.63 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**80.946.840.000**	**79.965.011.119**	**981.828.881**	**98,79**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**19.717.024.000**	**19.142.994.708**	**574.029.292**	**97,09**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**958.044.000**	**935.039.137**	**23.004.863**	**97,60**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	558.044.000	539.514.063	18.529.937,00	96,68
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	395.525.074	4.474.926,00	98,88
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.799.424.000**	**13.468.006.688**	**331.417.312**	**97,60**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.180.144.000	12.854.294.364	325.849.636,00	97,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.780.000	524.838.624	4.941.376,00	99,07
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	39.922.900	77.100,00	99,81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	5.456.800	43.200,00	99,21
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	39.522.500	477.500,00	98,81
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**147.635.396**	**2.364.604**	**98,42**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	147.635.396	2.364.604,00	98,42
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**49.890.000**	**110.000**	**99,78**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	49.890.000	110.000,00	99,78
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.788.056.000**	**1.785.493.981**	**2.562.019**	**99,86**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	44.864.000	136.000,00	99,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	119.328.000	672.000,00	99,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	310.747.100	108.900,00	99,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.570.000	430.000,00	97,85
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	998.200.000	998.005.033	194.967,00	99,98
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	252.979.848	1.020.152,00	99,60
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**686.500.000**	**683.989.000**	**2.511.000**	**99,63**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.500.000	461.500.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.595.000.000**	**1.389.960.506**	**205.039.494**	**87,14**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	186.479.633	3.520.367,00	98,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.000.000	380.437.340	199.562.660,00	65,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	823.043.533	1.956.467,00	99,76
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**682.980.000**	**7.020.000**	**98,98**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	542.980.000	7.020.000,00	98,72
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	65.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	65.000.000	-	100,00
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.541.301.000**	**53.208.885.236**	**332.415.764**	**99,38**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**384.420.766**	**579.234**	**99,85**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	114.871.697	128.303,00	99,89
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	269.549.069	450.931,00	99,83
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**172.691.412**	**308.588**	**99,82**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	172.691.412	308.588,00	99,82
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**24.043.392.688**	**228.007.312**	**99,06**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	5.042.299.887	27.700.113,00	99,45
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	6.922.384.192	52.615.808,00	99,25
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	12.078.708.609	147.691.391,00	98,79
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.711.901.000**	**28.608.380.370**	**103.520.630**	**99,64**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.711.901.000	28.608.380.370	103.520.630,00	99,64
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.847.462.000**	**3.806.798.086**	**40.663.914**	**98,94**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**481.252.000**	**475.185.142**	**6.066.858**	**98,74**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	136.440.348	3.559.652,00	97,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	341.252.000	338.744.794	2.507.206,00	99,27
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.366.210.000**	**3.331.612.944**	**34.597.056**	**98,97**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.366.210.000	3.331.612.944	34.597.056,00	98,97
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.022.117.000**	**988.524.071**	**33.592.929**	**96,71**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.022.117.000**	**988.524.071**	**33.592.929**	**96,71**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.022.117.000	988.524.071	33.592.929,00	96,71
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**379.545.600**	**454.400**	**99,88**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**379.545.600**	**454.400**	**99,88**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	379.545.600	454.400,00	99,88
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**676.804.600**	**195.400**	**99,97**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**676.804.600**	**195.400**	**99,97**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	599.936.600	63.400,00	99,99
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	76.868.000	132.000,00	99,83
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**569.056.300**	**287.700**	**99,95**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**569.056.300**	**287.700**	**99,95**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	195.181.000	194.938.000	243.000,00	99,88
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	27.410.000	27.410.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	346.753.000	346.708.300	44.700,00	99,99
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.192.592.000**	**1.192.402.518**	**189.482**	**99,98**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.192.592.000**	**1.192.402.518**	**189.482**	**99,98**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.192.592.000	1.192.402.518	189.482,00	99,98
	JUMLAH	**80.946.840.000**	**79.965.011.119**	**981.828.881**	**98,79**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN NOVEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan November pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, November 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISPERKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan November sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, November 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISPERAKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 80.946.840.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 80.258.890.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 687.950.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Dipindai dengan CamScanner

Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 30 November 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**80.946.840.000**	**70.180.246.318**	**86,70**	**10.766.593.682**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**80.258.890.000**	**69.494.807.318**	**86,59**	**10.764.082.682**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.627.104.000	12.317.975.800	90,39	1.309.128.200
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.572.650.000	5.088.832.061	91,32	483.817.939
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.093.953.000	3.768.218.000	92,04	325.735.000
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.093.953.000**	**3.768.218.000**	**92,04**	**325.735.000**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	359.813.000	331.845.968	92,23	27.967.032
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**359.813.000**	**331.845.968**	**92,23**	**27.967.032**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	213.080.000	197.050.000	92,48	16.030.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**213.080.000**	**197.050.000**	**92,48**	**16.030.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.515.000	67.840.000	76,64	20.675.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**88.515.000**	**67.840.000**	**76,64**	**20.675.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	139.295.000	128.950.000	92,57	10.345.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**139.295.000**	**128.950.000**	**92,57**	**10.345.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	212.572.000	195.389.160	91,92	17.182.840
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**212.572.000**	**195.389.160**	**91,92**	**17.182.840**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.354.000	15.205.267	62,43	9.148.733
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**24.354.000**	**15.205.267**	**62,43**	**9.148.733**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	811.000	55.918	6,89	755.082
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**811.000**	**55.918**	**6,89**	**755.082**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	402.257.000	353.767.227	87,95	48.489.773
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**402.257.000**	**353.767.227**	**87,95**	**48.489.773**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.000.000	7.627.632	76,28	2.372.368
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**10.000.000**	**7.627.632**	**76,28**	**2.372.368**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.000.000	22.882.889	81,72	5.117.111
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**28.000.000**	**22.882.889**	**81,72**	**5.117.111**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.607.494.000	6.823.293.739	89,69	784.200.261
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.607.494.000	6.823.293.739	89,69	784.200.261
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**7.607.494.000**	**6.823.293.739**	**89,69**	**784.200.261**
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	446.960.000	405.850.000	90,80	41.110.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	446.960.000	405.850.000	90,80	41.110.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	432.000.000	392.250.000	90,80	39.750.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.960.000	13.600.000	90,91	1.360.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.744.283.000	18.569.629.378	81,65	4.174.653.622
5.1.2.1	Belanja Barang	4.637.870.000	3.012.724.736	64,96	1.625.145.264
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.637.870.000	3.012.724.736	64,96	1.625.145.264
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	310.856.000	285.574.000	91,87	25.282.000
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.650.000	7.000.000	91,50	650.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.000.000	47.911.224	99,82	88.776
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	409.998.000	391.695.660	95,54	18.302.340
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	384.492.000	361.440.500	94	23.051.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.850.000	22.350.000	93,71	1.500.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.000.000	44.864.000	99,70	136.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.550.000	20.550.000	100	0
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.577.372.000	198.001.352	12,55	1.379.370.648
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.807.102.000	1.630.338.000	90,22	176.764.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.407.289.000	7.640.667.180	81,22	1.766.621.820
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.941.159.000	6.548.437.801	82,46	1.392.721.199
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	813.850.000	713.650.000	87,69	100.200.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.310.105.000	4.451.560.000	83,83	858.545.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.420.000	38.885.000	91,67	3.535.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	158.040.000	141.735.000	89,68	16.305.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	31.350.000	91,67	2.850.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	233.812.200	92,05	20.187.800
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	416.596.620	91,75	37.440.380
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	34.197.350	99,99	2.650
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.407.000	77.770.000	42,17	106.637.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	6.000.000	95,24	300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	26.900.000	24.665.000	91,69	2.235.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	120.000.000	43.263.150	36,05	76.736.850

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**30.000.000**	**6.436.800**	**21,46**	**23.563.200**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**430.000.000**	**295.819.681**	**68,80**	**134.180.319**
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	**18.550.000**	**16.830.000**	**90,73**	**1.720.000**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**24.150.000**	**15.867.000**	**65,70**	**8.283.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	251.693.929	94,31	15.189.071
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	**105.444.000**	**94.985.748**	**90,08**	**10.458.252**
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	**5.078.000**	**4.019.496**	**79,16**	**1.058.504**
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	**6.361.000**	**5.053.289**	**79,44**	**1.307.711**
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**150.000.000**	**147.635.396**	**98,42**	**2.364.604**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.4.409	**Belanja Sewa Peralatan Personal Computer**	**37.500.000**	**37.500.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**75.700.000**	**75.700.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	504.203.000	274.131.000	54,37	230.072.000
5.1.2.2.8.2	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**	**242.162.000**	**203.580.800**	**84,07**	**38.581.200**
5.1.2.2.8.13	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya**	**39.209.000**	**31.367.200**	**80**	**7.841.800**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**39.183.000**	**39.183.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8.22	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**183.649.000**	**0**	**0**	**183.649.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	524.844.000	431.204.450	82,16	93.639.550
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**49.770.000**	**49.770.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**368.074.000**	**357.436.250**	**97,11**	**10.637.750**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**23.998.200**	**22,43**	**83.001.800**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	2.000.000	5,41	35.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**2.000.000**	**5,41**	**35.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	602.649.000	90,51	63.201.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	328.049.000	89,67	37.801.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**10.600.000**	**100**	**0**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**201.794.000**	**89,35**	**24.056.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**44.400.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**61.255.000**	**94,24**	**3.745.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	274.600.000	91,53	25.400.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**274.600.000**	**91,53**	**25.400.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.805.774.000	7.086.088.462	90,78	719.685.538
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.805.774.000	7.086.088.462	90,78	719.685.538
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.801.774.000**	**6.159.288.462**	**90,55**	**642.485.538**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.004.000.000**	**926.800.000**	**92,31**	**77.200.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	227.500.000	100	0
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	227.500.000	100	0
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**227.500.000**	**100**	**0**
5.1.5	Belanja Hibah	1.067.503.000	1.065.802.140	99,84	1.700.860
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.067.503.000	1.065.802.140	99,84	1.700.860
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	498.825.000	497.124.598	99,66	1.700.402
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**498.825.000**	**497.124.598**	**99,66**	**1.700.402**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	568.678.000	568.677.542	100	458
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**568.678.000**	**568.677.542**	**100**	**458**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.820.000.000	37.541.400.000	87,67	5.278.600.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.820.000.000	37.541.400.000	87,67	5.278.600.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.820.000.000	37.541.400.000	87,67	5.278.600.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.820.000.000**	**37.541.400.000**	**87,67**	**5.278.600.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**687.950.000**	**685.439.000**	**99,64**	**2.511.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.500.000	683.989.000	99,63	2.511.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	461.500.000	461.500.000	100	0
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	461.500.000	461.500.000	100	0
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**461.500.000**	**461.500.000**	**100**	**0**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**80.946.840.000**	**70.180.246.318**	**86,70**	**10.766.593.682**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(70.180.246.318)**	**100**	**70.180.246.318**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(70.180.246.318)**	**100**	**70.180.246.318**

Semarang, 30 November 2023

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja Murni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.946.840.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 80.258.890.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 687.950.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Perubahan Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.627.104.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.317.975.800,- dengan Presentasi 90.39 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.744.283.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.569.629.378,- dengan Presentasi 81.65 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.820.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.541.400.000,- dengan Presentasi 87.67 %.

Dipindai dengan CamScanner

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 687.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 99.64 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 686.500.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 99.63 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**80.946.840.000**	**70.180.246.318**	**10.766.593.682**	**86,70**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**19.717.024.000**	**17.650.555.021**	**2.066.468.979**	**89,52**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**958.044.000**	**746.974.933**	**211.069.067**	**77,97**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	558.044.000	404.748.611	153.295.389,00	72,53
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	342.226.322	57.773.678,00	85,56
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.799.424.000**	**12.480.515.572**	**1.318.908.428**	**90,44**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.180.144.000	11.912.125.800	1.268.018.200,00	90,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.780.000	481.752.072	48.027.928,00	90,93
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	39.922.900	77.100,00	99,81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	4.220.800	1.279.200,00	76,74
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	38.522.500	1.477.500,00	96,31
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**147.635.396**	**2.364.604**	**98,42**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	147.635.396	2.364.604,00	98,42
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**8.809.000**	**41.191.000**	**17,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	8.809.000	41.191.000,00	17,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.788.056.000**	**1.688.398.729**	**99.657.271**	**94,43**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	44.864.000	136.000,00	99,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	119.328.000	672.000,00	99,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	285.574.000	25.282.000,00	91,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	38.672.500	1.327.500,00	96,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.280.000	1.720.000,00	91,40
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	998.200.000	938.106.933	60.093.067,00	93,98
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	243.573.296	10.426.704,00	95,89
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**686.500.000**	**683.989.000**	**2.511.000**	**99,63**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.500.000	461.500.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.595.000.000**	**1.275.716.391**	**319.283.609**	**79,98**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	171.373.762	18.626.238,00	90,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.000.000	345.519.631	234.480.369,00	59,57
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	758.822.998	66.177.002,00	91,98
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**618.516.000**	**71.484.000**	**89,64**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	492.261.000	57.739.000,00	89,50
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	61.255.000	3.745.000,00	94,24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	55.000.000	10.000.000,00	84,62
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.541.301.000**	**46.914.256.142**	**6.627.044.858**	**87,62**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**367.530.188**	**17.469.812**	**95,46**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	108.677.671	6.322.329,00	94,50
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	258.852.517	11.147.483,00	95,87
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**168.568.136**	**4.431.864**	**97,44**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	168.568.136	4.431.864,00	97,44
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**20.431.904.600**	**3.839.495.400**	**84,18**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	4.561.165.481	508.834.519,00	89,96
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	6.656.862.332	318.137.668,00	95,44
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	9.213.876.787	3.012.523.213,00	75,36
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.711.901.000**	**25.946.253.218**	**2.765.647.782**	**90,37**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.711.901.000	25.946.253.218	2.765.647.782,00	90,37
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.847.462.000**	**2.030.778.132**	**1.816.683.868**	**52,78**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**481.252.000**	**467.728.588**	**13.523.412**	**97,19**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	128.983.794	11.016.206,00	92,13
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	341.252.000	338.744.794	2.507.206,00	99,27
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.366.210.000**	**1.563.049.544**	**1.803.160.456**	**46,43**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.366.210.000	1.563.049.544	1.803.160.456,00	46,43
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.022.117.000**	**957.066.147**	**65.050.853**	**93,64**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.022.117.000**	**957.066.147**	**65.050.853**	**93,64**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.022.117.000	957.066.147	65.050.853,00	93,64
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**361.400.050**	**18.599.950**	**95,11**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**361.400.050**	**18.599.950**	**95,11**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	361.400.050	18.599.950,00	95,11
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**598.333.050**	**78.666.950**	**88,38**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**598.333.050**	**78.666.950**	**88,38**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	521.465.050	78.534.950,00	86,91
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	76.868.000	132.000,00	99,83
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**531.488.025**	**37.855.975**	**93,35**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**531.488.025**	**37.855.975**	**93,35**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	195.181.000	191.638.000	3.543.000,00	98,18
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	27.410.000	27.410.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	346.753.000	312.440.025	34.312.975,00	90,10
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.192.592.000**	**1.136.369.751**	**56.222.249**	**95,29**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.192.592.000**	**1.136.369.751**	**56.222.249**	**95,29**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.192.592.000	1.136.369.751	56.222.249,00	95,29
	JUMLAH	**80.946.840.000**	**70.180.246.318**	**10.766.593.682**	**86,70**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN OKTOBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Oktober pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Oktober 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Oktober sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Oktober 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 31 Oktober 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**59.703.198.341**	**72,29**	**22.880.868.659**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**59.017.759.341**	**72,16**	**22.769.857.659**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	11.361.183.701	74,49	3.890.884.299
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	4.715.661.037	76,87	1.419.166.963
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	3.495.761.700	80,49	847.332.300
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**3.495.761.700**	**80,49**	**847.332.300**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	308.006.978	65,78	160.251.022
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**308.006.978**	**65,78**	**160.251.022**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	182.640.000	81,38	41.780.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**182.640.000**	**81,38**	**41.780.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	62.425.000	56,37	48.315.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**62.425.000**	**56,37**	**48.315.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	120.105.000	87,90	16.535.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**120.105.000**	**87,90**	**16.535.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	181.122.420	75,09	60.069.580
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**181.122.420**	**75,09**	**60.069.580**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	14.810.096	72,42	5.640.904
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**14.810.096**	**72,42**	**5.640.904**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	51.627	4,05	1.222.373
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**51.627**	**4,05**	**1.222.373**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	322.843.277	59,15	222.915.723
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**322.843.277**	**59,15**	**222.915.723**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	6.973.734	63,40	4.026.266
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**6.973.734**	**63,40**	**4.026.266**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	20.921.205	65,38	11.078.795
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**20.921.205**	**65,38**	**11.078.795**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	6.275.982.664	72,66	2.362.017.336
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	6.275.982.664	72,66	2.362.017.336
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**6.275.982.664**	**72,66**	**2.362.017.336**
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	369.540.000	77,11	109.700.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	369.540.000	77,11	109.700.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	460.200.000	357.300.000	77,64	102.900.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.040.000	12.240.000	64,29	6.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	16.352.898.098	72,79	6.113.650.902
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	2.550.502.899	53,15	2.247.928.101
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	2.550.502.899	53,15	2.247.928.101
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	310.856.000	262.249.500	84,36	48.606.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.650.000	7.000.000	91,50	650.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.000.000	47.911.224	99,82	88.776
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	389.423.000	359.739.175	92,38	29.683.825
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	385.297.000	337.949.500	87,71	47.347.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.850.000	20.700.000	86,79	3.150.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.000.000	40.185.500	89,30	4.814.500
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.550.000	17.700.000	86,13	2.850.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.805.000	1.454.068.000	82,39	310.737.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	6.842.986.480	73,15	2.511.343.520
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	5.772.427.996	73,51	2.079.819.004
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	902.550.000	665.450.000	73,73	237.100.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.114.860.000	3.851.850.000	75,31	1.263.010.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.420.000	35.350.000	83,33	7.070.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	158.040.000	128.850.000	81,53	29.190.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	28.500.000	83,33	5.700.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	213.451.970	84,04	40.548.030
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	379.168.200	83,51	74.868.800
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	31.088.500	90,90	3.111.500
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	70.700.000	38,25	114.140.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	6.000.000	95,24	300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	19.865.000	82,43	4.235.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	39.397.329	28,14	100.602.671

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**30.000.000**	**5.842.500**	**19,48**	**24.157.500**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**430.000.000**	**266.078.497**	**61,88**	**163.921.503**
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	**18.550.000**	**15.540.000**	**83,77**	**3.010.000**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**24.150.000**	**15.296.000**	**63,34**	**8.854.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	242.023.034	90,69	24.859.966
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	**105.444.000**	**86.157.680**	**81,71**	**19.286.320**
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	**5.078.000**	**3.652.251**	**71,92**	**1.425.749**
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	**6.361.000**	**4.577.707**	**71,97**	**1.783.293**
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**150.000.000**	**147.635.396**	**98,42**	**2.364.604**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.4.409	**Belanja Sewa Peralatan Personal Computer**	**37.500.000**	**37.500.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**75.700.000**	**75.700.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	274.131.000	52,72	245.869.000
5.1.2.2.8.2	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**	**250.000.000**	**203.580.800**	**81,43**	**46.419.200**
5.1.2.2.8.13	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya**	**40.000.000**	**31.367.200**	**78,42**	**8.632.800**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**40.000.000**	**39.183.000**	**97,96**	**817.000**
5.1.2.2.8.22	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	419.204.450	76,92	125.795.550
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**50.000.000**	**49.770.000**	**99,54**	**230.000**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**388.000.000**	**345.436.250**	**89,03**	**42.563.750**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**23.998.200**	**22,43**	**83.001.800**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	2.000.000	5,41	35.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**2.000.000**	**5,41**	**35.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	535.444.000	80,42	130.406.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	294.644.000	80,54	71.206.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**10.600.000**	**100**	**0**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	225.850.000	177.994.000	78,81	47.856.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	44.400.000	41.695.000	93,91	2.705.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	65.000.000	54.355.000	83,62	10.645.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	240.800.000	80,27	59.200.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**240.800.000**	**80,27**	**59.200.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	6.246.464.719	84,18	1.173.973.281
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	6.246.464.719	84,18	1.173.973.281
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**5.325.664.719**	**83,23**	**1.072.773.281**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**920.800.000**	**90,10**	**101.200.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**177.500.000**	**78,02**	**50.000.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	568.677.542	45,35	685.322.458
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	568.677.542	45,35	685.322.458
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	568.677.542	88,86	71.322.458
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**568.677.542**	**88,86**	**71.322.458**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	30.735.000.000	71,79	12.080.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	30.735.000.000	71,79	12.080.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	30.735.000.000	71,79	12.080.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**30.735.000.000**	**71,79**	**12.080.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**685.439.000**	**86,06**	**111.011.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	683.989.000	86,04	111.011.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**59.703.198.341**	**72,29**	**22.880.868.659**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(59.703.198.341)**	**100**	**59.703.198.341**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(59.703.198.341)**	**100**	**59.703.198.341**

Semarang, 31 Oktober 2023

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.361.183.701,- dengan Presentasi 74.49 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.652.898.098,- dengan Presentasi 72.79 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.735.000.000,- dengan Presentasi 71.79 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 86.06 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 86.04 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	82.584.067.000	59.703.198.341	22.880.868.659	72,29
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.393.820.000	16.165.270.649	5.228.549.351	75,56
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**660.323.829**	**273.332.171**	**70,72**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	355.281.059	178.374.941,00	66,57
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	305.042.770	94.957.230,00	76,26
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**11.500.786.921**	**3.919.521.079**	**74,58**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.772.828.000	10.991.643.701	3.781.184.299,00	74,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	438.665.520	119.314.480,00	78,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	39.032.900	967.100,00	97,58
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	4.220.800	1.279.200,00	76,74
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	23.252.500	16.747.500,00	58,13
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**147.635.396**	**2.364.604**	**98,42**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	147.635.396	2.364.604,00	98,42
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**8.809.000**	**41.191.000**	**17,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	8.809.000	41.191.000,00	17,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**1.454.372.607**	**285.483.393**	**83,59**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	40.185.500	4.814.500,00	89,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	108.066.000	11.934.000,00	90,06
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	262.249.500	48.606.500,00	84,36
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	38.342.500	1.657.500,00	95,86
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	16.990.000	3.010.000,00	84,95
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	754.372.363	195.627.637,00	79,41
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	234.166.744	19.833.256,00	92,19
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**683.989.000**	**111.011.000**	**86,04**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**1.158.613.896**	**456.386.104**	**71,74**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	156.117.891	33.882.109,00	82,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	311.318.326	288.681.674,00	51,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	691.177.679	133.822.321,00	83,78
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**550.740.000**	**139.260.000**	**79,82**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	434.090.000	115.910.000,00	78,93
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	54.355.000	10.645.000,00	83,62
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	52.295.000	12.705.000,00	80,45
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	53.156.654.000	39.063.577.230	14.093.076.770	73,49
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**343.497.610**	**41.502.390**	**89,22**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	97.900.645	17.099.355,00	85,13
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	245.596.965	24.403.035,00	90,96
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**162.247.485**	**10.752.515**	**93,78**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	173.000.000	162.247.485	10.752.515,00	93,78
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**16.445.240.875**	**7.826.159.125**	**67,76**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5 070 000 000	4 237 300 925	832 699 075 00	83,58
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6 975 000 000	5 413 359 566	1 561 640 434 00	77,61
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12 226 400 000	6 794 580 384	5 431 819 616,00	55,57
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**22.112.591.260**	**6.214.662.740**	**78,06**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28 327 254 000	22.112 591 260	6 214 662 740,00	78,06
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**1.226.798.483**	**2.891.450.517**	**29,79**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**440.219.990**	**59.780.010**	**88,04**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140 000 000	121 527 240	18 472 760,00	86,81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360 000 000	318 692 750	41 307 250,00	88,53
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**786.578.493**	**2.831.670.507**	**21,74**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3 618 249 000	786 578 493	2 831 670 507,00	21,74
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**915.875.845**	**179.124.155**	**83,64**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**915.875.845**	**179.124.155**	**83,64**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1 095 000 000	915 875 845	179 124 155,00	83,64
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**341.163.500**	**38.836.500**	**89,78**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**341.163.500**	**38.836.500**	**89,78**
	Sub Kegiatan Pembentahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380 000 000	341 163 500	38 836 500,00	89,78
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**528.352.500**	**148.647.500**	**78,04**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**528.352.500**	**148.647.500**	**78,04**
	Sub Kegiatan Inventansasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600 000 000	452 739 500	147 260 500,00	75,46
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77 000 000	75 613 000	1 387 000,00	98,20
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**479.703.750**	**89.640.250**	**84,26**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**479.703.750**	**89.640.250**	**84,26**
	Sub Kegiatan Inventansasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221 461 000	179 227 000	42 234 000,00	80,93
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agrana Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30 770 000	27 410 000	3 360 000,00	89,08
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113 000	273 066 750	44 046 250,00	86,11
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**982.456.384**	**211.543.616**	**82,28**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**982.456.384**	**211.543.616**	**82,28**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1 194 000 000	982 456 384	211 543 616,00	82,28
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**59.703.198.341**	**22.880.868.659**	**72,29**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN SEPTEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan September pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan September sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, September 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 30 September 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**53.410.183.712**	**64,67**	**29.173.883.288**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**52.724.744.712**	**64,47**	**29.062.872.288**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	10.411.180.029	68,26	4.840.887.971
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	4.343.114.716	70,79	1.791.713.284
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	3.223.611.600	74,22	1.119.482.400
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**3.223.611.600**	**74,22**	**1.119.482.400**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	284.201.222	60,69	184.056.778
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**284.201.222**	**60,69**	**184.056.778**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	168.230.000	74,96	56.190.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**168.230.000**	**74,96**	**56.190.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	57.010.000	51,48	53.730.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**57.010.000**	**51,48**	**53.730.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	111.260.000	81,43	25.380.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**111.260.000**	**81,43**	**25.380.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	166.855.680	69,18	74.336.320
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**166.855.680**	**69,18**	**74.336.320**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	14.428.567	70,55	6.022.433
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**14.428.567**	**70,55**	**6.022.433**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	47.450	3,72	1.226.550
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**47.450**	**3,72**	**1.226.550**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	292.187.899	53,54	253.571.101
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**292.187.899**	**53,54**	**253.571.101**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	6.320.574	57,46	4.679.426
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**6.320.574**	**57,46**	**4.679.426**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	18.961.724	59,26	13.038.276
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**18.961.724**	**59,26**	**13.038.276**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	5.734.835.313	66,39	2.903.164.687
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	5.734.835.313	66,39	2.903.164.687
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**5.734.835.313**	**66,39**	**2.903.164.687**
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	333.230.000	69,53	146.010.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	333.230.000	69,53	146.010.000
5.1.1.3.7.1	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**460.200.000**	**322.350.000**	**70,05**	**137.850.000**
5.1.1.3.7.2	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**19.040.000**	**10.880.000**	**57,14**	**8.160.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	15.020.125.912	66,86	7.446.423.088
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	2.375.384.269	49,50	2.423.046.731
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	2.375.384.269	49,50	2.423.046.731
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**310.856.000**	**235.969.500**	**75,91**	**74.886.500**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**7.650.000**	**7.000.000**	**91,50**	**650.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**48.000.000**	**47.911.224**	**99,82**	**88.776**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**389.423.000**	**327.810.045**	**84,18**	**61.612.955**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**385.297.000**	**317.221.500**	**82,33**	**68.075.500**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**23.850.000**	**18.900.000**	**79,25**	**4.950.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.000.000	34.599.000	76,89	10.401.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.550.000	17.700.000	86,13	2.850.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.805.000	1.365.273.000	77,36	399.532.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	6.153.149.041	65,78	3.201.180.959
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	5.160.864.100	65,72	2.691.382.900
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	902.550.000	647.550.000	71,75	255.000.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.114.860.000	3.379.580.000	66,07	1.735.280.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.420.000	31.815.000	75	10.605.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	158.040.000	115.965.000	73,38	42.075.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	25.650.000	75	8.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	193.310.740	76,11	60.689.260
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	341.739.780	75,27	112.297.220
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	27.979.650	81,81	6.220.350
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	63.630.000	34,42	121.210.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	6.000.000	95,24	300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	17.865.000	74,13	6.235.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	35.516.871	25,37	104.483.129
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	30.000.000	5.248.200	17,49	24.751.800
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	430.000.000	240.149.359	55,85	189.850.641
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	13.905.000	74,96	4.645.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.150.000	14.959.500	61,94	9.190.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	232.738.691	87,21	34.144.309
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.444.000	77.683.112	73,67	27.760.888
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.078.000	3.292.351	64,84	1.785.649
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.361.000	4.127.832	64,89	2.233.168
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000	147.635.396	98,42	2.364.604
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	75.700.000	75.700.000	100	0
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	225.096.800	43,29	294.903.200
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000	193.729.600	77,49	56.270.400
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	40.000.000	31.367.200	78,42	8.632.800
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.22	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	401.249.450	73,62	143.750.550
5.1.2.2.9.3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000	49.770.000	99,54	230.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	388.000.000	327.481.250	84,40	60.518.750

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**23.998.200**	**22,43**	**83.001.800**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	472.560.000	70,97	193.290.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	264.260.000	72,23	101.590.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**4.891.000**	**46,14**	**5.709.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**162.264.000**	**71,85**	**63.586.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**39.145.000**	**88,16**	**5.255.000**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**47.960.000**	**73,78**	**17.040.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	208.300.000	69,43	91.700.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**208.300.000**	**69,43**	**91.700.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	5.841.532.602	78,72	1.578.905.398
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	5.841.532.602	78,72	1.578.905.398
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**4.941.132.602**	**77,22**	**1.457.305.398**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**900.400.000**	**88,10**	**121.600.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**177.500.000**	**78,02**	**50.000.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	284.338.771	22,67	969.661.229
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	284.338.771	22,67	969.661.229
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	284.338.771	44,43	355.661.229
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**284.338.771**	**44,43**	**355.661.229**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	27.009.100.000	63,08	15.805.900.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	27.009.100.000	63,08	15.805.900.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	27.009.100.000	63,08	15.805.900.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**27.009.100.000**	**63,08**	**15.805.900.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**685.439.000**	**86,06**	**111.011.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	683.989.000	86,04	111.011.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**53.410.183.712**	**64,67**	**29.173.883.288**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(53.410.183.712)**	**100**	**53.410.183.712**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(53.410.183.712)**	**100**	**53.410.183.712**

Semarang, 30 September 2023

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.411.180.029,- dengan Presentasi 68.26 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.020.125.912,- dengan Presentasi 66.86 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 27.009.100.000,- dengan Presentasi 63.08 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 86.06 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 86.04 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**53.410.183.712**	**29.173.883.288**	**64,67**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**14.883.606.523**	**6.510.213.477**	**69,57**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**618.290.225**	**315.365.775**	**66,22**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533 656 000	340 807 507	192 848 493,00	63,86
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400 000 000	277 482 718	122 517 282,00	69,37
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**10.542.256.697**	**4.878.051.303**	**68,37**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 772 828 000	10 077 950 029	4 694 877 971,00	68,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557 980 000	395 578 968	162 401 032,00	70,89
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 000 000	39 032 900	967 100,00	97,58
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 000 000	3 971 500	28 500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 500 000	4 220 800	1 279 200,00	76,74
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40 000 000	21 502 500	18 497 500,00	53,76
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150 000.000**	**147.635.396**	**2.364.604**	**98,42**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150 000 000	147 635 396	2 364 604,00	98,42
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**6.809.000**	**43.191.000**	**13,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 000 000	6 809 000	43.191 000,00	13,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**1.351.728.895**	**388.127.105**	**77,69**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45 000 000	34 599 000	10 401 000,00	76,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120 000 000	98 656 800	21 343 200,00	82,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310 856 000	235 969 500	74 886 500,00	75,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40 000 000	37 267 500	2 732 500,00	93,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 000 000	15 355 000	4 645 000,00	76,78
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950 000 000	706 970 903	243 029 097,00	74,42
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254 000 000	222 910 192	31 089 808,00	87,76
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**683.989.000**	**111.011.000**	**86,04**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570 000 000	461 500 000	108 500 000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50 000 000	49 839 000	161 000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175 000 000	172 650 000	2 350 000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**1.045.377.810**	**569.622.190**	**64,73**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190 000 000	140 712 020	49 287 980,00	74,06
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600 000 000	280 914 430	319 085 570,00	46,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825 000 000	623 751 360	201 248 640,00	75,61
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**487.519.500**	**202.480.500**	**70,66**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550 000 000	385 523 500	164 476 500,00	70,10
	Sub Kegiatan Mebel	10 000 000	10 000 000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65 000 000	47 960 000	17 040 000,00	73,78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65 000 000	44 036 000	20 964 000,00	67,75
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**34.621.306.675**	**18.535.347.325**	**65,13**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**328.387.547**	**56.612.453**	**85,30**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115 000 000	92 321 619	22 678 381,00	80,28
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270 000 000	236 065 928	33 934 072,00	87,43
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**156.343.979**	**16.656.021**	**90,37**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173 000 000	156 343 979	16 656 021,00	90,37
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**13.437.964.142**	**10.833.435.858**	**55,37**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5 070 000 000	3 202 978 409	1 867 021 591,00	63,18
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6 975 000 000	4 266 328 760	2 708 671 240,00	61,17
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12 226 400 000	5 968 656 973	6 257 743 027,00	48,82
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**20.698.611.007**	**7.628.642.993**	**73,07**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28 327 254 000	20 698 611 007	7 628 642 993,00	73,07
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**1.186.967.608**	**2.931.281.392**	**28,82**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**427.561.436**	**72.438.564**	**85,51**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140 000 000	114 070 686	25 929 314,00	81,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360 000 000	313 490 750	46 509 250,00	87,08
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**759.406.172**	**2.858.842.828**	**20,99**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3 618 249 000	759 406 172	2 858 842 828,00	20,99
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**560.903.570**	**534.096.430**	**51,22**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**560.903.570**	**534.096.430**	**51,22**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1 095 000 000	560 903 570	534 096 430,00	51,22
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**321.736.950**	**58.263.050**	**84,67**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**321.736.950**	**58.263.050**	**84,67**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380 000 000	321 736 950	58 263 050,00	84,67
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**501.507.950**	**175.492.050**	**74,08**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**501.507.950**	**175.492.050**	**74,08**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600 000 000	427.469 950	172.530 050,00	71,24
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77 000 000	74 038 000	2.962.000,00	96,15
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**434.865.475**	**134.478.525**	**76,38**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**434.865.475**	**134.478.525**	**76,38**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221 461 000	179 227.000	42 234 000,00	80,93
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30 770 000	13 655 000	17.115 000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113 000	241 983 475	75.129 525,00	76,31
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**899.288.961**	**294.711.039**	**75,32**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**899.288.961**	**294.711.039**	**75,32**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	1.194 000 000	899 288 961	294 711 039,00	75,32
	JUMLAH	**82 584.067.000**	**53.410.183.712**	**29.173.883.288**	**64,67**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN AGUSTUS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Agustus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Agustus sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 31 Agustus 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**46.621.388.001**	**56,45**	**35.962.678.999**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**45.935.949.001**	**56,16**	**35.851.667.999**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	9.450.098.769	61,96	5.801.969.231
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	3.959.416.353	64,54	2.175.411.647
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	2.943.574.700	67,78	1.399.519.300
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**2.943.574.700**	**67,78**	**1.399.519.300**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	259.494.184	55,42	208.763.816
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**259.494.184**	**55,42**	**208.763.816**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	153.280.000	68,30	71.140.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**153.280.000**	**68,30**	**71.140.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	50.675.000	45,76	60.065.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**50.675.000**	**45,76**	**60.065.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	102.415.000	74,95	34.225.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**102.415.000**	**74,95**	**34.225.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	152.226.840	63,11	88.965.160
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**152.226.840**	**63,11**	**88.965.160**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	14.004.463	68,48	6.446.537
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**14.004.463**	**68,48**	**6.446.537**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	43.226	3,39	1.230.774
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**43.226**	**3,39**	**1.230.774**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	261.108.997	47,84	284.650.003
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**261.108.997**	**47,84**	**284.650.003**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	5.648.485	51,35	5.351.515
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**5.648.485**	**51,35**	**5.351.515**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	16.945.458	52,95	15.054.542
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**16.945.458**	**52,95**	**15.054.542**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	5.193.762.416	60,13	3.444.237.584
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	5.193.762.416	60,13	3.444.237.584
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**5.193.762.416**	**60,13**	**3.444.237.584**
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	296.920.000	61,96	182.320.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	296.920.000	61,96	182.320.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	460.200.000	287.400.000	62,45	172.800.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.040.000	9.520.000	50	9.520.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	13.336.450.232	59,36	9.130.098.768
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	2.183.697.619	45,51	2.614.733.381
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	2.183.697.619	45,51	2.614.733.381
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	310.856.000	207.144.000	66,64	103.712.000
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.650.000	7.000.000	91,50	650.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.000.000	47.911.224	99,82	88.776
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	389.423.000	294.227.395	75,55	95.195.605
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	385.297.000	262.737.500	68,19	122.559.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.850.000	16.900.000	70,86	6.950.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.000.000	31.957.500	71,02	13.042.500
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.550.000	14.820.000	72,12	5.730.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.805.000	1.298.000.000	73,55	466.805.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	5.401.407.262	57,74	3.952.922.738
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	4.608.396.036	58,69	3.243.850.964
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	902.550.000	636.050.000	70,47	266.500.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.114.860.000	2.962.635.000	57,92	2.152.225.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.420.000	28.280.000	66,67	14.140.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	158.040.000	103.080.000	65,22	54.960.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	22.800.000	66,67	11.400.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	172.642.810	67,97	81.357.190
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	304.311.360	67,02	149.725.640
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	24.870.800	72,72	9.329.200
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	56.560.000	30,60	128.280.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	6.000.000	95,24	300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	17.365.000	72,05	6.735.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	31.518.963	22,51	108.481.037

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	30.000.000	4.653.900	15,51	25.346.100
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	430.000.000	212.478.203	49,41	217.521.797
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	12.360.000	66,63	6.190.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.150.000	12.790.000	52,96	11.360.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	75.463.176	28,28	191.419.824
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.444.000	68.869.294	65,31	36.574.706
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.078.000	2.925.106	57,60	2.152.894
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.361.000	3.668.776	57,68	2.692.224
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000	0	0	150.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	37.500.000	37.500.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	75.700.000	75.700.000	100	0
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	225.096.800	43,29	294.903.200
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000	193.729.600	77,49	56.270.400
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	40.000.000	31.367.200	78,42	8.632.800
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.22	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	359.251.250	65,92	185.748.750
5.1.2.2.9.3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000	49.770.000	99,54	230.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	388.000.000	309.481.250	79,76	78.518.750
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	107.000.000	0	0	107.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	412.275.000	61,92	253.575.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	237.675.000	64,97	128.175.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.600.000	4.891.000	46,14	5.709.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**143.764.000**	**63,65**	**82.086.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**36.320.000**	**81,80**	**8.080.000**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**42.700.000**	**65,69**	**22.300.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	174.600.000	58,20	125.400.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**174.600.000**	**58,20**	**125.400.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	5.161.570.351	69,56	2.258.867.649
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	5.161.570.351	69,56	2.258.867.649
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**4.277.270.351**	**66,85**	**2.121.167.649**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**884.300.000**	**86,53**	**137.700.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	177.500.000	78,02	50.000.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**177.500.000**	**78,02**	**50.000.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	23.149.400.000	54,07	19.665.600.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	23.149.400.000	54,07	19.665.600.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	23.149.400.000	54,07	19.665.600.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**23.149.400.000**	**54,07**	**19.665.600.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**685.439.000**	**86,06**	**111.011.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	683.989.000	86,04	111.011.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**46.621.388.001**	**56,45**	**35.962.678.999**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(46.621.388.001)**	**100**	**46.621.388.001**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(46.621.388.001)**	**100**	**46.621.388.001**

Semarang, 31 Agustus 2023

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.450.098.769,- dengan Presentasi 61.96 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.336.450.232,- dengan Presentasi 59.36 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.149.400.000,- dengan Presentasi 54.07 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 86.06 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 86.04 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	82.584.067.000	46.621.388.001	35.962.678.999	56,45
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.393.820.000	13.299.540.390	8.094.279.610	62,17
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**572.980.236**	**360.675.764**	**61,37**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	326.750.570	206.905.430,00	61,23
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	246.229.666	153.770.334,00	61,56
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**9.569.057.385**	**5.851.250.615**	**62,05**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	9.153.178.769	5.619.649.231,00	61,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	352.492.416	205.487.584,00	63,17
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	34.469.400	5.530.600,00	86,17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	3.442.800	2.057.200,00	62,60
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	21.502.500	18.497.500,00	53,76
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**6.809.000**	**43.191.000**	**13,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	6.809.000	43.191.000,00	13,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**1.112.084.213**	**627.771.787**	**63,92**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	31.957.500	13.042.500,00	71,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	88.249.800	31.750.200,00	73,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	207.144.000	103.712.000,00	66,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	34.427.500	5.572.500,00	86,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	13.810.000	6.190.000,00	69,05
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	522.241.773	427.758.227,00	54,97
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	214.253.640	39.746.360,00	84,35
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**683.989.000**	**111.011.000**	**86,04**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**929.555.556**	**685.444.444**	**57,56**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	125.106.149	64.893.851,00	65,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	248.651.066	351.348.934,00	41,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	555.798.341	269.201.659,00	67,37
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**425.065.000**	**264.935.000**	**61,60**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	331.154.000	218.846.000,00	60,21
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	42.700.000	22.300.000,00	65,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	41.211.000	23.789.000,00	63,40
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	53.156.654.000	30.087.273.886	23.069.380.114	56,60
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**306.624.664**	**78.375.336**	**79,64**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	82.843.153	32.156.847,00	72,04
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	223.781.511	46.218.489,00	82,88
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**149.852.473**	**23.147.527**	**86,62**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	149.852.473	23.147.527,00	86,62
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**12.094.703.888**	**12.176.696.112**	**49,83**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5 070 000 000	1 988 133 808	3 081 866 192,00	39,21
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6 975 000 000	4 181 801 414	2 793 198 586,00	59,95
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12 226 400 000	5 924 768 666	6 301 631 334,00	48,46
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**17.536.092.861**	**10.791.161.139**	**61,91**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28 327 254 000	17 536 092 861	10 791 161 139,00	61,91
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**1.062.712.939**	**3.055.536.061**	**25,80**
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**389.182.182**	**110.817.818**	**77,84**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140 000 000	82 615 932	57 384 068,00	59,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360 000 000	306 566 250	53 433 750,00	85,16
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**673.530.757**	**2.944.718.243**	**18,61**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3 618 249 000	673 530 757	2 944 718 243,00	18,61
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**254.424.999**	**840.575.001**	**23,24**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**254.424.999**	**840.575.001**	**23,24**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1 095 000 000	254 424 999	840 575 001,00	23,24
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**290.590.400**	**89.409.600**	**76,47**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**290.590.400**	**89.409.600**	**76,47**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380 000 000	290 590 400	89 409 600,00	76,47
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**471.858.900**	**205.141.100**	**69,70**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**471.858.900**	**205.141.100**	**69,70**
	Sub Kegiatan Inventansasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600 000 000	404 455 900	195 544 100,00	67,41
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77 000 000	67 403 000	9 597 000,00	87,54
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**391.122.200**	**178.221.800**	**68,70**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**391.122.200**	**178.221.800**	**68,70**
	Sub Kegiatan Inventansasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221 461 000	176 057 000	45 404 000,00	79,50
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30 770 000	13 655 000	17 115 000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317 113 000	201 410 200	115 702 800,00	63,51
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**763.864.287**	**430.135.713**	**63,98**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**763.864.287**	**430.135.713**	**63,98**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194 000 000	763 864 287	430 135 713,00	63,98
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**46.621.388.001**	**35.962.678.999**	**56,45**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN JULI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Juli pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Juli sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juli 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 31 Juli 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**38.981.413.128**	**47,20**	**43.602.653.872**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**38.295.974.128**	**46,82**	**43.491.642.872**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	8.447.620.410	55,39	6.804.447.590
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	3.564.134.538	58,10	2.570.693.462
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	2.654.565.800	61,12	1.688.528.200
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**2.654.565.800**	**61,12**	**1.688.528.200**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	234.262.804	50,03	233.995.196
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**234.262.804**	**50,03**	**233.995.196**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	138.330.000	61,64	86.090.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**138.330.000**	**61,64**	**86.090.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	44.340.000	40,04	66.400.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**44.340.000**	**40,04**	**66.400.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	93.195.000	68,20	43.445.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**93.195.000**	**68,20**	**43.445.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	137.308.320	56,93	103.883.680
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**137.308.320**	**56,93**	**103.883.680**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	13.579.680	66,40	6.871.320
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**13.579.680**	**66,40**	**6.871.320**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	39.104	3,07	1.234.896
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**39.104**	**3,07**	**1.234.896**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	228.694.372	41,90	317.064.628
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**228.694.372**	**41,90**	**317.064.628**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	4.954.864	45,04	6.045.136
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**4.954.864**	**45,04**	**6.045.136**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	14.864.594	46,45	17.135.406
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**14.864.594**	**46,45**	**17.135.406**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	4.624.075.872	53,53	4.013.924.128
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	4.624.075.872	53,53	4.013.924.128
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**4.624.075.872**	**53,53**	**4.013.924.128**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	259.410.000	54,13	219.830.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	259.410.000	54,13	219.830.000
5.1.1.3.7.1	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**460.200.000**	**251.250.000**	**54,60**	**208.950.000**
5.1.1.3.7.2	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**19.040.000**	**8.160.000**	**42,86**	**10.880.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	11.182.553.718	49,77	11.283.995.282
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	1.911.384.909	39,83	2.887.046.091
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	1.911.384.909	39,83	2.887.046.091
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**310.856.000**	**180.176.500**	**57,96**	**130.679.500**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**7.650.000**	**7.000.000**	**91,50**	**650.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**48.000.000**	**47.911.224**	**99,82**	**88.776**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**389.423.000**	**269.137.185**	**69,11**	**120.285.815**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**385.297.000**	**245.371.500**	**63,68**	**139.925.500**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**23.850.000**	**13.150.000**	**55,14**	**10.700.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**45.000.000**	**27.845.500**	**61,88**	**17.154.500**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**20.550.000**	**9.880.000**	**48,08**	**10.670.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.764.805.000**	**1.107.913.000**	**62,78**	**656.892.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	4.352.833.010	46,53	5.001.496.990
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	3.790.148.619	48,27	4.062.098.381
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**902.550.000**	**536.050.000**	**59,39**	**366.500.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**5.114.860.000**	**2.366.385.000**	**46,26**	**2.748.475.000**
5.1.2.2.1.16	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**42.420.000**	**24.745.000**	**58,33**	**17.675.000**
5.1.2.2.1.24	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**	**158.040.000**	**90.195.000**	**57,07**	**67.845.000**
5.1.2.2.1.26	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**	**34.200.000**	**19.950.000**	**58,33**	**14.250.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	152.790.980	60,15	101.209.020
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	266.882.940	58,78	187.154.060
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	21.761.950	63,63	12.438.050
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	49.490.000	26,77	135.350.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	6.000.000	95,24	300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	16.615.000	68,94	7.485.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	27.105.143	19,36	112.894.857
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	30.000.000	4.059.600	13,53	25.940.400
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	430.000.000	188.209.506	43,77	241.790.494
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	10.815.000	58,30	7.735.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.150.000	9.093.500	37,65	15.056.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	66.117.591	24,77	200.765.409
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.444.000	60.381.226	57,26	45.062.774
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.078.000	2.535.826	49,94	2.542.174
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.361.000	3.200.539	50,32	3.160.461
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000	0	0	150.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	36.000.000	96	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	37.500.000	36.000.000	96	1.500.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	95.700.000	100	0
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	75.700.000	75.700.000	100	0
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	225.096.800	43,29	294.903.200
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000	193.729.600	77,49	56.270.400
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	40.000.000	31.367.200	78,42	8.632.800
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	40.000.000	0	0	40.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.2 2	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	139.770.000	25,65	405.230.000
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**50.000.000**	**49.770.000**	**99,54**	**230.000**
5.1.2.2.9.1 2	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**388.000.000**	**90.000.000**	**23,20**	**298.000.000**
5.1.2.2.9.1 4	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**0**	**0**	**107.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.2.12. 1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	354.390.000	53,22	311.460.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	216.990.000	59,31	148.860.000
5.1.2.3.2.2 2	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**4.891.000**	**46,14**	**5.709.000**
5.1.2.3.2.2 3	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.3 6	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**129.579.000**	**57,37**	**96.271.000**
5.1.2.3.2.1 18	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.1 21	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**33.920.000**	**76,40**	**10.480.000**
5.1.2.3.2.4 11	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**38.600.000**	**59,38**	**26.400.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	137.400.000	45,80	162.600.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**137.400.000**	**45,80**	**162.600.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	4.498.945.799	60,63	2.921.492.201
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	4.498.945.799	60,63	2.921.492.201
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**3.767.545.799**	**58,88**	**2.630.892.201**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**731.400.000**	**71,57**	**290.600.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	65.000.000	28,57	162.500.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	65.000.000	28,57	162.500.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**65.000.000**	**28,57**	**162.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	18.665.800.000	43,60	24.149.200.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	18.665.800.000	43,60	24.149.200.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	18.665.800.000	43,60	24.149.200.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**18.665.800.000**	**43,60**	**24.149.200.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**685.439.000**	**86,06**	**111.011.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	683.989.000	86,04	111.011.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**38.981.413.128**	**47,20**	**43.602.653.872**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(38.981.413.128)**	**100**	**38.981.413.128**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(38.981.413.128)**	**100**	**38.981.413.128**

Semarang, 31 Juli 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.447.620.410,- dengan Presentasi 55.39 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.182.553.718,- dengan Presentasi 49.77 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.665.800.000,- dengan Presentasi 43.60 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 86.06 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 86.04 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**38.981.413.128**	**43.602.653.872**	**47,20**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**11.937.943.976**	**9.455.876.024**	**55,80**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**518.250.632**	**415.405.368**	**55,51**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	301.588.018	232.067.982,00	56,51
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	216.662.614	183.337.386,00	54,17
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**8.552.186.974**	**6.868.121.026**	**55,46**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.772.828.000	8.188.210.410	6.584.617.590,00	55,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	308.205.864	249.774.136,00	55,24
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	26.853.900	13.146.100,00	67,13
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	3.442.800	2.057.200,00	62,60
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	21.502.500	18.497.500,00	53,76
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**6.809.000**	**43.191.000**	**13,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	6.809.000	43.191.000,00	13,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**997.438.921**	**742.417.079**	**57,33**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	27.845.500	17.154.500,00	61,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	76.594.300	43.405.700,00	63,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	180.176.500	130.679.500,00	57,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	33.627.500	6.372.500,00	84,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	12.265.000	7.735.000,00	61,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	463.633.033	486.366.967,00	48,80
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	203.297.088	50.702.912,00	80,04
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**683.989.000**	**111.011.000**	**86,04**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**815.785.949**	**799.214.051**	**50,51**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	107.741.097	82.258.903,00	56,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	219.374.249	380.625.751,00	36,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	488.670.603	336.329.397,00	59,23
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**363.483.500**	**326.516.500**	**52,68**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	276.072.500	273.927.500,00	50,20
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	38.600.000	26.400.000,00	59,38
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	38.811.000	26.189.000,00	59,71
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**24.456.704.016**	**28.699.949.984**	**46,01**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**282.709.905**	**102.290.095**	**73,43**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	68.051.127	46.948.873,00	59,17
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	214.658.778	55.341.222,00	79,50
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**146.125.197**	**26.874.803**	**84,47**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	146.125.197	26.874.803,00	84,47
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**8.764.715.189**	**15.506.684.811**	**36,11**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	1.157.838.602	3.912.161.398,00	22,84
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	3.302.989.588	3.672.010.412,00	47,35
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	4.303.886.999	7.922.513.001,00	35,20
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**15.263.153.725**	**13.064.100.275**	**53,88**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	15.263.153.725	13.064.100.275,00	53,88
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**804.913.070**	**3.313.335.930**	**19,55**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**170.576.878**	**329.423.122**	**34,12**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	73.368.378	66.631.622,00	52,41
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	97.208.500	262.791.500,00	27,00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**634.336.192**	**2.983.912.808**	**17,53**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	634.336.192	2.983.912.808,00	17,53
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**215.490.070**	**879.509.930**	**19,68**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**215.490.070**	**879.509.930**	**19,68**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	215.490.070	879.509.930,00	19,68
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**260.494.850**	**119.505.150**	**68,55**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**260.494.850**	**119.505.150**	**68,55**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	260.494.850	119.505.150,00	68,55
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**338.502.600**	**338.497.400**	**50,00**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**338.502.600**	**338.497.400**	**50,00**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	275.124.600	324.875.400,00	45,85
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	63.378.000	13.622.000,00	82,31
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**334.198.925**	**235.145.075**	**58,70**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**334.198.925**	**235.145.075**	**58,70**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	157.487.000	63.974.000,00	71,11
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	163.056.925	154.056.075,00	51,42
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**633.165.621**	**560.834.379**	**53,03**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**633.165.621**	**560.834.379**	**53,03**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	633.165.621	560.834.379,00	53,03
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**38.981.413.128**	**43.602.653.872**	**47,20**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN JUNI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Juni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Juni sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juni 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**31.448.648.467**	**38,08**	**51.135.418.533**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**30.763.209.467**	**37,61**	**51.024.407.533**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	7.442.465.806	48,80	7.809.602.194
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	3.169.343.858	51,66	2.965.484.142
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	2.366.020.700	54,48	1.977.073.300
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**2.366.020.700**	**54,48**	**1.977.073.300**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	209.049.724	44,64	259.208.276
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**209.049.724**	**44,64**	**259.208.276**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	123.380.000	54,98	101.040.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**123.380.000**	**54,98**	**101.040.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	38.005.000	34,32	72.735.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**38.005.000**	**34,32**	**72.735.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	83.980.000	61,46	52.660.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**83.980.000**	**61,46**	**52.660.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	122.389.800	50,74	118.802.200
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**122.389.800**	**50,74**	**118.802.200**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	13.155.576	64,33	7.295.424
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**13.155.576**	**64,33**	**7.295.424**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	34.921	2,74	1.239.079
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**34.921**	**2,74**	**1.239.079**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	196.278.711	35,96	349.480.289
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**196.278.711**	**35,96**	**349.480.289**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	4.262.356	38,75	6.737.644
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**4.262.356**	**38,75**	**6.737.644**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	12.787.070	39,96	19.212.930
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**12.787.070**	**39,96**	**19.212.930**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	4.051.221.948	46,90	4.586.778.052
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	4.051.221.948	46,90	4.586.778.052
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**4.051.221.948**	**46,90**	**4.586.778.052**
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	221.900.000	46,30	257.340.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	221.900.000	46,30	257.340.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	460.200.000	215.100.000	46,74	245.100.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.040.000	6.800.000	35,71	12.240.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	9.128.243.661	40,63	13.338.305.339
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	1.629.434.175	33,96	3.168.996.825
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	1.629.434.175	33,96	3.168.996.825
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	310.856.000	153.986.500	49,54	156.869.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.000.000	0	0	48.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	389.423.000	240.088.675	61,65	149.334.325
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	385.297.000	224.577.500	58,29	160.719.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.850.000	11.150.000	46,75	12.700.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.000.000	24.591.500	54,65	20.408.500
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.550.000	9.880.000	48,08	10.670.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.805.000	962.160.000	54,52	802.645.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	3.434.929.967	36,72	5.919.400.033
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	3.032.661.229	38,62	4.819.585.771
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	902.550.000	423.850.000	46,96	478.700.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.114.860.000	1.845.525.000	36,08	3.269.335.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.420.000	21.210.000	50	21.210.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	158.040.000	77.310.000	48,92	80.730.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	17.100.000	50	17.100.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	132.134.100	52,02	121.865.900
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	229.454.520	50,54	224.582.480
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	18.653.100	54,54	15.546.900
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	42.420.000	22,95	142.420.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	0	0	6.300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	16.315.000	67,70	7.785.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	23.261.994	16,62	116.738.006

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**30.000.000**	**3.465.300**	**11,55**	**26.534.700**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**430.000.000**	**165.004.715**	**38,37**	**264.995.285**
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	**18.550.000**	**9.270.000**	**49,97**	**9.280.000**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**24.150.000**	**7.687.500**	**31,83**	**16.462.500**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	56.671.938	21,23	210.211.062
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	**105.444.000**	**51.730.658**	**49,06**	**53.713.342**
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	**5.078.000**	**2.181.435**	**42,96**	**2.896.565**
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	**6.361.000**	**2.759.845**	**43,39**	**3.601.155**
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	28.500.000	76	9.000.000
5.1.2.2.4.409	**Belanja Sewa Peralatan Personal Computer**	**37.500.000**	**28.500.000**	**76**	**9.000.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	20.000.000	20,90	75.700.000
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**75.700.000**	**0**	**0**	**75.700.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	225.096.800	43,29	294.903.200
5.1.2.2.8.2	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**	**250.000.000**	**193.729.600**	**77,49**	**56.270.400**
5.1.2.2.8.13	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya**	**40.000.000**	**31.367.200**	**78,42**	**8.632.800**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
5.1.2.2.8.22	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	72.000.000	13,21	473.000.000
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**388.000.000**	**72.000.000**	**18,56**	**316.000.000**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**0**	**0**	**107.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	289.214.000	43,44	376.636.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	180.914.000	49,45	184.936.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**4.891.000**	**46,14**	**5.709.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**114.873.000**	**50,86**	**110.977.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**28.200.000**	**63,51**	**16.200.000**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**32.950.000**	**50,69**	**32.050.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	108.300.000	36,10	191.700.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**108.300.000**	**36,10**	**191.700.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	3.709.665.519	49,99	3.710.772.481
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	3.709.665.519	49,99	3.710.772.481
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**3.139.165.519**	**49,06**	**3.259.272.481**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**570.500.000**	**55,82**	**451.500.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	65.000.000	28,57	162.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	65.000.000	28,57	162.500.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**65.000.000**	**28,57**	**162.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	14.192.500.000	33,15	28.622.500.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	14.192.500.000	33,15	28.622.500.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	14.192.500.000	33,15	28.622.500.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**14.192.500.000**	**33,15**	**28.622.500.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**685.439.000**	**86,06**	**111.011.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	683.989.000	86,04	111.011.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	101.800.000	99,80	200.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	92.800.000	99,78	200.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**92.800.000**	**99,78**	**200.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	9.000.000	100	0
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100**	**0**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**31.448.648.467**	**38,08**	**51.135.418.533**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(31.448.648.467)**	**100**	**31.448.648.467**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(31.448.648.467)**	**100**	**31.448.648.467**

Semarang, 30 Juni 2023

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST,MM)

NIP. 19770905 200212 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.442.465.806,- dengan Presentasi 48.80 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.128.243.661,- dengan Presentasi 40.63 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.192.500.000,- dengan Presentasi 33.15 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.439.000,- dengan Presentasi 86.06 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 683.989.000,- dengan Presentasi 86.04 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**31.448.648.467**	**51.135.418.533**	**38,08**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**10.408.880.270**	**10.984.939.730**	**48,65**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**437.442.838**	**496.213.162**	**46,85**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	279.429.776	254.226.224,00	52,36
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	158.013.062	241.986.938,00	39,50
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**7.534.838.318**	**7.885.469.682**	**48,86**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	7.220.565.806	7.552.262.194,00	48,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	263.919.312	294.060.688,00	47,30
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	21.436.400	18.563.600,00	53,59
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	3.442.800	2.057.200,00	62,60
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	21.502.500	18.497.500,00	53,76
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**6.809.000**	**43.191.000**	**13,62**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	6.809.000	43.191.000,00	13,62
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**744.303.745**	**995.552.255**	**42,78**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	24.591.500	20.408.500,00	54,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	62.081.500	57.918.500,00	51,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	153.986.500	156.869.500,00	49,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	32.027.500	7.972.500,00	80,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	10.720.000	9.280.000,00	53,60
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	399.267.433	550.732.567,00	42,03
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	61.629.312	192.370.688,00	24,26
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**683.989.000**	**111.011.000**	**86,04**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	172.650.000	2.350.000,00	98,66
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**704.595.869**	**910.404.131**	**43,63**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	92.135.226	97.864.774,00	48,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	191.732.009	408.267.991,00	31,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	420.728.634	404.271.366,00	51,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**296.901.500**	**393.098.500**	**43,03**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	230.860.500	319.139.500,00	41,97
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	32.950.000	32.050.000,00	50,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	33.091.000	31.909.000,00	50,91
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**18.795.505.412**	**34.361.148.588**	**35,36**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**249.309.008**	**135.690.992**	**64,76**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	42.297.101	72.702.899,00	36,78
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	207.011.907	62.988.093,00	76,67
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**142.396.921**	**30.603.079**	**82,31**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	142.396.921	30.603.079,00	82,31
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**6.547.534.830**	**17.723.865.170**	**26,98**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	131.802.031	4.938.197.969,00	2,60
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	2.871.075.767	4.103.924.233,00	41,16
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	3.544.657.032	8.681.742.968,00	28,99
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**11.856.264.653**	**16.470.989.347**	**41,85**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	11.856.264.653	16.470.989.347,00	41,85
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**674.435.850**	**3.443.813.150**	**16,38**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**104.053.824**	**395.946.176**	**20,81**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	62.714.824	77.285.176,00	44,80
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	41.339.000	318.661.000,00	11,48
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**570.382.026**	**3.047.866.974**	**15,76**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	570.382.026	3.047.866.974,00	15,76
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**196.367.516**	**898.632.484**	**17,93**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**196.367.516**	**898.632.484**	**17,93**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	196.367.516	898.632.484,00	17,93
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**241.658.300**	**138.341.700**	**63,59**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**241.658.300**	**138.341.700**	**63,59**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	241.658.300	138.341.700,00	63,59
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**308.276.800**	**368.723.200**	**45,54**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**308.276.800**	**368.723.200**	**45,54**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	247.409.800	352.590.200,00	41,23
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	60.867.000	16.133.000,00	79,05
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**298.019.650**	**271.324.350**	**52,34**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**298.019.650**	**271.324.350**	**52,34**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	151.106.000	70.355.000,00	68,23
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	133.258.650	183.854.350,00	42,02
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**525.504.669**	**668.495.331**	**44,01**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**525.504.669**	**668.495.331**	**44,01**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	525.504.669	668.495.331,00	44,01
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**31.448.648.467**	**51.135.418.533**	**38,08**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN MEI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Mei pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Mei sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Mei 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**
7. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 31 Mei 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**25.229.064.991**	**30,55**	**57.355.002.009**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**24.645.425.991**	**30,13**	**57.142.191.009**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	5.750.757.602	37,70	9.501.310.398
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	2.402.464.610	39,16	3.732.363.390
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	1.782.913.900	41,05	2.560.180.100
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**4.343.094.000**	**1.782.913.900**	**41,05**	**2.560.180.100**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	158.023.810	33,75	310.234.190
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**468.258.000**	**158.023.810**	**33,75**	**310.234.190**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	92.940.000	41,41	131.480.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**224.420.000**	**92.940.000**	**41,41**	**131.480.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	25.335.000	22,88	85.405.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**110.740.000**	**25.335.000**	**22,88**	**85.405.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	65.545.000	47,97	71.095.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**136.640.000**	**65.545.000**	**47,97**	**71.095.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	92.480.340	38,34	148.711.660
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**241.192.000**	**92.480.340**	**38,34**	**148.711.660**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	7.362.814	36	13.088.186
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**20.451.000**	**7.362.814**	**36**	**13.088.186**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	25.631	2,01	1.248.369
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**1.274.000**	**25.631**	**2,01**	**1.248.369**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	163.565.961	29,97	382.193.039
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**545.759.000**	**163.565.961**	**29,97**	**382.193.039**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	3.568.038	32,44	7.431.962
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**11.000.000**	**3.568.038**	**32,44**	**7.431.962**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	10.704.116	33,45	21.295.884
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**32.000.000**	**10.704.116**	**33,45**	**21.295.884**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	3.162.782.992	36,61	5.475.217.008
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	3.162.782.992	36,61	5.475.217.008
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**8.638.000.000**	**3.162.782.992**	**36,61**	**5.475.217.008**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	185.510.000	38,71	293.730.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	185.510.000	38,71	293.730.000
5.1.1.3.7.1	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**460.200.000**	**180.750.000**	**39,28**	**279.450.000**
5.1.1.3.7.2	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**19.040.000**	**4.760.000**	**25**	**14.280.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	7.332.668.389	32,64	15.133.880.611
5.1.2.1	Belanja Barang	4.798.431.000	1.343.916.800	28,01	3.454.514.200
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.798.431.000	1.343.916.800	28,01	3.454.514.200
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**310.856.000**	**126.581.500**	**40,72**	**184.274.500**
5.1.2.1.1.9	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**389.423.000**	**197.819.300**	**50,80**	**191.603.700**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**385.297.000**	**166.313.500**	**43,17**	**218.983.500**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**23.850.000**	**9.550.000**	**40,04**	**14.300.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**45.000.000**	**20.438.500**	**45,42**	**24.561.500**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**20.550.000**	**6.830.000**	**33,24**	**13.720.000**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**1.764.805.000**	**816.384.000**	**46,26**	**948.421.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.354.330.000	2.624.134.597	28,05	6.730.195.403
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.852.247.000	2.406.675.623	30,65	5.445.571.377
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**902.550.000**	**368.350.000**	**40,81**	**534.200.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**5.114.860.000**	**1.400.765.000**	**27,39**	**3.714.095.000**
5.1.2.2.1.16	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**42.420.000**	**17.675.000**	**41,67**	**24.745.000**
5.1.2.2.1.24	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**	**158.040.000**	**64.425.000**	**40,76**	**93.615.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.200.000	14.250.000	41,67	19.950.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.000.000	112.032.170	44,11	141.967.830
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	454.037.000	192.026.100	42,29	262.010.900
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	15.544.250	45,45	18.655.750
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	184.840.000	35.350.000	19,12	149.490.000
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.300.000	0	0	6.300.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.100.000	15.015.000	62,30	9.085.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	140.000.000	19.368.121	13,83	120.631.879
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	30.000.000	2.871.000	9,57	27.129.000
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	430.000.000	138.337.982	32,17	291.662.018
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	7.725.000	41,64	10.825.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.150.000	2.941.000	12,18	21.209.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	47.186.974	17,68	219.696.026
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.444.000	43.079.340	40,86	62.364.660
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.078.000	1.806.845	35,58	3.271.155
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.361.000	2.300.789	36,17	4.060.211
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000	0	0	150.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	25.500.000	68	12.000.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	37.500.000	25.500.000	68	12.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	20.000.000	20,90	75.700.000
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	75.700.000	0	0	75.700.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	70.772.000	13,61	449.228.000
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000	39.404.800	15,76	210.595.200
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	40.000.000	31.367.200	78,42	8.632.800

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
5.1.2.2.8.22	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri**	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	545.000.000	54.000.000	9,91	491.000.000
5.1.2.2.9.3	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**388.000.000**	**54.000.000**	**13,92**	**334.000.000**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**107.000.000**	**0**	**0**	**107.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	665.850.000	248.474.000	37,32	417.376.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.850.000	151.974.000	41,54	213.876.000
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**10.600.000**	**4.891.000**	**46,14**	**5.709.000**
5.1.2.3.2.23	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**225.850.000**	**99.873.000**	**44,22**	**125.977.000**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**44.400.000**	**22.825.000**	**51,41**	**21.575.000**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**65.000.000**	**24.385.000**	**37,52**	**40.615.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	96.500.000	32,17	203.500.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**300.000.000**	**96.500.000**	**32,17**	**203.500.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.438.000	3.086.142.992	41,59	4.334.295.008
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.420.438.000	3.086.142.992	41,59	4.334.295.008
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**6.398.438.000**	**2.585.642.992**	**40,41**	**3.812.795.008**
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	**1.022.000.000**	**500.500.000**	**48,97**	**521.500.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	30.000.000	13,19	197.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	30.000.000	13,19	197.500.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**227.500.000**	**30.000.000**	**13,19**	**197.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
5.1.5.5.1.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	11.562.000.000	27	31.253.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	11.562.000.000	27	31.253.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	11.562.000.000	27	31.253.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**42.815.000.000**	**11.562.000.000**	**27**	**31.253.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**583.639.000**	**73,28**	**212.811.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	582.189.000	73,23	212.811.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1.2	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	108.839.000	98,05	2.161.000
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**61.000.000**	**59.000.000**	**96,72**	**2.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	0	0	102.000.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	93.000.000	0	0	93.000.000
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	**93.000.000**	**0**	**0**	**93.000.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000	0	0	9.000.000
5.2.2.10.2.3	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**9.000.000**	**0**	**0**	**9.000.000**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1.1.1	**Belanja Modal Buku Umum**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**25.229.064.991**	**30,55**	**57.355.002.009**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(25.229.064.991)**	**100**	**25.229.064.991**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(25.229.064.991)**	**100**	**25.229.064.991**

Semarang, 31 Mei 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST.MM)
NIP. 19770905 200212 1 004

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.750.757.602,- dengan Presentasi 37.70 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.332.668.389,- dengan Presentasi 32.64 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.562.000.000,- dengan Presentasi 27.00 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 583.639.000,- dengan Presentasi 73.28 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 582.189.000,- dengan Presentasi 73.23 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kes (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**25.229.064.991**	**57.355.002.009**	**30,55**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**8.251.531.362**	**13.142.288.638**	**38,57**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**386.197.484**	**547.458.516**	**41,36**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	256.495.724	277.160.276,00	48,06
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	129.701.760	270.298.240,00	32,43
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**5.833.448.562**	**9.586.859.438**	**37,83**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	5.565.247.602	9.207.580.398,00	37,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	221.432.760	336.547.240,00	39,68
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	21.151.400	18.848.600,00	52,88
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	3.442.800	2.057.200,00	62,60
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	18.202.500	21.797.500,00	45,51
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	-	150.000.000	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	-	**50.000.000**	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**607.433.243**	**1.132.422.757**	**34,91**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	20.438.500	24.561.500,00	45,42
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	49.325.500	70.674.500,00	41,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	126.581.500	184.274.500,00	40,72
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	30.427.500	9.572.500,00	76,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	9.175.000	10.825.000,00	45,88
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	323.812.483	626.187.517,00	34,09
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	47.672.760	206.327.240,00	18,77
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**582.189.000**	**212.811.000**	**73,23**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	70.850.000	104.150.000,00	40,49
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**590.848.073**	**1.024.151.927**	**36,59**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	76.929.355	113.070.645,00	40,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	160.577.103	439.422.897,00	26,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	353.341.615	471.658.385,00	42,83
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**251.415.000**	**438.585.000**	**36,44**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	199.314.000	350.686.000,00	36,24
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	24.385.000	40.615.000,00	37,52
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	27.716.000	37.284.000,00	42,64
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**15.253.273.051**	**37.903.380.949**	**28,69**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**214.596.345**	**170.403.655**	**55,74**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	22.371.825	92.628.175,00	19,45
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	192.224.520	77.775.480,00	71,19
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**127.547.980**	**45.452.020**	**73,73**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	127.547.980	45.452.020,00	73,73
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**5.289.249.731**	**18.982.150.269**	**21,79**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	106.289.800	4.963.710.200,00	2,10
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	2.420.609.391	4.554.390.609,00	34,70
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	2.762.350.540	9.464.049.460,00	22,59
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**9.621.878.995**	**18.705.375.005**	**33,97**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	9.621.878.995	18.705.375.005,00	33,97
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**452.304.775**	**3.665.944.225**	**10,98**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**84.802.770**	**415.197.230**	**16,96**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	53.508.270	86.491.730,00	38,22
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	31.294.500	328.705.500,00	8,69
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**367.502.005**	**3.250.746.995**	**10,16**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	367.502.005	3.250.746.995,00	10,16
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**184.733.972**	**910.266.028**	**16,87**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**184.733.972**	**910.266.028**	**16,87**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	184.733.972	910.266.028,00	16,87
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**209.499.750**	**170.500.250**	**55,13**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**209.499.750**	**170.500.250**	**55,13**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	209.499.750	170.500.250,00	55,13
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**234.906.750**	**442.093.250**	**34,70**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**234.906.750**	**442.093.250**	**34,70**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	195.391.750	404.608.250,00	32,57
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	39.515.000	37.485.000,00	51,32
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**235.761.375**	**333.582.625**	**41,41**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**235.761.375**	**333.582.625**	**41,41**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	138.446.000	83.015.000,00	62,51
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	83.660.375	233.452.625,00	26,38
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**407.053.956**	**786.946.044**	**34,09**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**407.053.956**	**786.946.044**	**34,09**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	407.053.956	786.946.044,00	34,09
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**25.229.064.991**	**57.355.002.009**	**30,55**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN APRIL

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan April pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan April sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, April 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**
7. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 30 April 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**17.039.092.728**	**20,63**	**65.544.974.272**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**16.514.453.728**	**20,19**	**65.273.163.272**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	4.720.435.303	30,95	10.531.632.697
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	2.001.024.016	32,62	4.133.803.984
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	1.489.106.200	34,29	2.853.987.800
	Belanja Gaji Pokok PNS	**4.343.094.000**	**1.489.106.200**	**34,29**	**2.853.987.800**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	132.238.430	28,24	336.019.570
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	**468.258.000**	**132.238.430**	**28,24**	**336.019.570**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	77.450.000	34,51	146.970.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	**224.420.000**	**77.450.000**	**34,51**	**146.970.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	21.200.000	19,14	89.540.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	**110.740.000**	**21.200.000**	**19,14**	**89.540.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	54.850.000	40,14	81.790.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	**136.640.000**	**54.850.000**	**40,14**	**81.790.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	77.416.980	32,10	163.775.020
	Belanja Tunjangan Beras PNS	**241.192.000**	**77.416.980**	**32,10**	**163.775.020**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	6.930.327	33,89	13.520.673
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	**20.451.000**	**6.930.327**	**33,89**	**13.520.673**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	21.446	1,68	1.252.554
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	**1.274.000**	**21.446**	**1,68**	**1.252.554**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	130.359.032	23,89	415.399.968
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	**545.759.000**	**130.359.032**	**23,89**	**415.399.968**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	2.862.900	26,03	8.137.100
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	**11.000.000**	**2.862.900**	**26,03**	**8.137.100**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	8.588.701	26,84	23.411.299
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	**32.000.000**	**8.588.701**	**26,84**	**23.411.299**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	2.571.411.287	29,77	6.066.588.713
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	2.571.411.287	29,77	6.066.588.713
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	**8.638.000.000**	**2.571.411.287**	**29,77**	**6.066.588.713**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	148.000.000	30,88	331.240.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	148.000.000	30,88	331.240.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	**460.200.000**	**144.600.000**	**31,42**	**315.600.000**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	**19.040.000**	**3.400.000**	**17,86**	**15.640.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	5.539.518.425	24,66	16.927.030.575
5.1.2.1	Belanja Barang	4.782.056.000	1.079.906.555	22,58	3.702.149.445
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.782.056.000	1.079.906.555	22,58	3.702.149.445
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	**310.856.000**	**102.601.500**	**33,01**	**208.254.500**
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**389.423.000**	**172.783.055**	**44,37**	**216.639.945**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	**399.172.000**	**144.391.500**	**36,17**	**254.780.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	**23.850.000**	**7.950.000**	**33,33**	**15.900.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	**45.000.000**	**16.042.500**	**35,65**	**28.957.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	**20.550.000**	**6.830.000**	**33,24**	**13.720.000**
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.734.555.000**	**629.308.000**	**36,28**	**1.105.247.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.380.890.000	1.950.919.147	20,80	7.429.970.853
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.893.807.000	1.802.047.647	22,83	6.091.759.353
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	**1.023.750.000**	**262.050.000**	**25,60**	**761.700.000**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	**5.030.020.000**	**1.017.805.000**	**20,23**	**4.012.215.000**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	**42.420.000**	**14.140.000**	**33,33**	**28.280.000**
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	**158.040.000**	**51.540.000**	**32,61**	**106.500.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	**34.200.000**	**11.400.000**	**33,33**	**22.800.000**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	**254.000.000**	**91.157.440**	**35,89**	**162.842.560**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	**454.037.000**	**154.597.680**	**34,05**	**299.439.320**
	Belanja Jasa Tenaga Supir	**34.200.000**	**12.435.400**	**36,36**	**21.764.600**
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	**184.840.000**	**28.280.000**	**15,30**	**156.560.000**
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	**6.300.000**	**0**	**0**	**6.300.000**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	**25.100.000**	**12.540.000**	**49,96**	**12.560.000**
	Belanja Tagihan Telepon	**140.000.000**	**15.524.807**	**11,09**	**124.475.193**
	Belanja Tagihan Air	**30.000.000**	**2.289.200**	**7,63**	**27.710.800**
	Belanja Tagihan Listrik	**430.000.000**	**119.380.120**	**27,76**	**310.619.880**
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	**18.550.000**	**6.180.000**	**33,32**	**12.370.000**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	**28.350.000**	**2.728.000**	**9,62**	**25.622.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	37.716.700	14,13	229.166.300
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	**105.444.000**	**34.428.022**	**32,65**	**71.015.978**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	**5.078.000**	**1.446.945**	**28,49**	**3.631.055**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	**6.361.000**	**1.841.733**	**28,95**	**4.519.267**
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.500.000	15.750.000	30	36.750.000
	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	**52.500.000**	**15.750.000**	**30**	**36.750.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	20.000.000	20,90	75.700.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	**75.700.000**	**0**	**0**	**75.700.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	39.404.800	7,58	480.595.200
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**250.000.000**	**39.404.800**	**15,76**	**210.595.200**
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	515.000.000	36.000.000	6,99	479.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**388.000.000**	**36.000.000**	**9,28**	**352.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	**77.000.000**	**0**	**0**	**77.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	661.650.000	202.403.000	30,59	459.247.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.650.000	120.403.000	33,29	241.247.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	**10.600.000**	**0**	**0**	**10.600.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	**221.650.000**	**83.703.000**	**37,76**	**137.947.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	**44.400.000**	**18.375.000**	**41,39**	**26.025.000**
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	**65.000.000**	**18.325.000**	**28,19**	**46.675.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	82.000.000	27,33	218.000.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**300.000.000**	**82.000.000**	**27,33**	**218.000.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.414.453.000	2.306.289.723	31,11	5.108.163.277
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.414.453.000	2.306.289.723	31,11	5.108.163.277
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	**6.691.453.000**	**2.016.389.723**	**30,13**	**4.675.063.277**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	**723.000.000**	**289.900.000**	**40,10**	**433.100.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**227.500.000**	**0**	**0**	**227.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	6.254.500.000	14,61	36.560.500.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	6.254.500.000	14,61	36.560.500.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	6.254.500.000	14,61	36.560.500.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	**42.815.000.000**	**6.254.500.000**	**14,61**	**36.560.500.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**524.639.000**	**65,87**	**271.811.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	523.189.000	65,81	271.811.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	49.839.000	44,90	61.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	49.839.000	44,90	61.161.000
	Belanja Modal Mebel	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
	Belanja Modal Alat Pendingin	**61.000.000**	**0**	**0**	**61.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	11.850.000	98,75	150.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**12.000.000**	**11.850.000**	**98,75**	**150.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	0	0	102.000.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.000.000	0	0	84.000.000
	Belanja Modal Personal Computer	**84.000.000**	**0**	**0**	**84.000.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000	0	0	18.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.450.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.450.000	100	0

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.450.000	100	0
	Belanja Modal Buku Umum	**1.450.000**	**1.450.000**	**100**	**0**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**17.039.092.728**	**20,63**	**65.544.974.272**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(17.039.092.728)**	**100**	**17.039.092.728**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(17.039.092.728)**	**100**	**17.039.092.728**

Semarang, 30 April 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.720.435.303,- dengan Presentasi 30.95 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.539.518.425,- dengan Presentasi 24.66 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.254.500.000,- dengan Presentasi 14.61 %.

Belanja Modal *:*

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 524.639.000,- dengan Presentasi 65.87 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 523.189.000,- dengan Presentasi 65.80 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- dengan Presentasi 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**17.039.092.728**	**65.544.974.272**	**20,63**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**6.777.598.241**	**14.616.221.759**	**31,68**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**315.499.380**	**618.156.620**	**33,79**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	216.401.672	317.254.328,00	40,55
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	99.097.708	300.902.292,00	24,77
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**4.790.790.711**	**10.629.517.289**	**31,07**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	4.572.435.303	10.200.392.697,00	30,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	177.146.208	380.833.792,00	31,75
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	18.812.400	21.187.600,00	47,03
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	2.442.800	3.057.200,00	44,41
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	15.982.500	24.017.500,00	39,96
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**-**	**50.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**458.888.743**	**1.280.967.257**	**26,38**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	16.042.500	28.957.500,00	35,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	44.125.500	75.874.500,00	36,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	102.601.500	208.254.500,00	33,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	29.252.500	10.747.500,00	73,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	7.630.000	12.370.000,00	38,15
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	220.670.535	729.329.465,00	23,23
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	38.566.208	215.433.792,00	15,18
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**523.189.000**	**271.811.000**	**65,81**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	11.850.000	163.150.000,00	6,77
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**484.099.407**	**1.130.900.593**	**29,98**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	61.723.484	128.276.516,00	32,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	137.194.127	462.805.873,00	22,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	285,181.796	539.818.204,00	34,57
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**205.131.000**	**484.869.000**	**29,73**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	168.431.000	381.569.000,00	30,62
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	18.325.000	46.675.000,00	28,19
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	18.375.000	46.625.000,00	28,27
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**8.913.927.407**	**44.242.726.593**	**16,77**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**196.692.742**	**188.307.258**	**51,09**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	17.327.104	97.672.896,00	15,07
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	179.365.638	90.634.362,00	66,43
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**110.707.619**	**62.292.381**	**63,99**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	110.707.619	62.292.381,00	63,99
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**4.196.328.752**	**20.075.071.248**	**17,29**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kas (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	32.970.674	5.037.029.326,00	0,65
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	1.802.343.895	5.172.656.105,00	25,84
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	2.361.014.183	9.865.385.817,00	19,31
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**4.410.198.294**	**23.917.055.706**	**15,57**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	4.410.198.294	23.917.055.706,00	15,57
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**371.001.700**	**3.747.247.300**	**9,01**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**68.264.216**	**431.735.784**	**13,65**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	46.051.716	93.948.284,00	32,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	22.212.500	337.787.500,00	6,17
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**302.737.484**	**3.315.511.516**	**8,37**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	302.737.484	3.315.511.516,00	8,37
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**152.880.347**	**942.119.653**	**13,96**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**152.880.347**	**942.119.653**	**13,96**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	152.880.347	942.119.653,00	13,96
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**165.993.200**	**214.006.800**	**43,68**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**165.993.200**	**214.006.800**	**43,68**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	165.993.200	214.006.800,00	43,68
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**177.646.200**	**499.353.800**	**26,24**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**177.646.200**	**499.353.800**	**26,24**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	143.087.200	456.912.800,00	23,85
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	34.559.000	42.441.000,00	44,88
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**166.055.100**	**403.288.900**	**29,17**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**166.055.100**	**403.288.900**	**29,17**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	114.983.000	106.478.000,00	51,92
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	37.417.100	279.695.900,00	11,80
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**313.990.533**	**880.009.467**	**26,30**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**313.990.533**	**880.009.467**	**26,30**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	313.990.533	880.009.467,00	26,30
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**17.039.092.728**	**65.544.974.272**	**20,63**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN MARET

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Maret pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Maret sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Maret 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 31 Maret 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**11.833.166.387**	**14,33**	**70.750.900.613**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**11.321.827.387**	**13,84**	**70.465.789.613**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	3.034.927.863	19,90	12.217.140.137
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	1.219.838.301	19,88	4.914.989.699
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	894.227.960	20,59	3.448.866.040
	Belanja Gaji Pokok PNS	**4.343.094.000**	**894.227.960**	**20,59**	**3.448.866.040**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	79.231.666	16,92	389.026.334
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	**468.258.000**	**79.231.666**	**16,92**	**389.026.334**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	46.470.000	20,71	177.950.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	**224.420.000**	**46.470.000**	**20,71**	**177.950.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	12.930.000	11,68	97.810.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	**110.740.000**	**12.930.000**	**11,68**	**97.810.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	32.930.000	24,10	103.710.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	**136.640.000**	**32.930.000**	**24,10**	**103.710.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	46.566.060	19,31	194.625.940
	Belanja Tunjangan Beras PNS	**241.192.000**	**46.566.060**	**19,31**	**194.625.940**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	1.240.940	6,07	19.210.060
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	**20.451.000**	**1.240.940**	**6,07**	**19.210.060**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	12.450	0,98	1.261.550
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	**1.274.000**	**12.450**	**0,98**	**1.261.550**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	97.644.637	17,89	448.114.363
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	**545.759.000**	**97.644.637**	**17,89**	**448.114.363**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	2.146.147	19,51	8.853.853
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	**11.000.000**	**2.146.147**	**19,51**	**8.853.853**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	6.438.441	20,12	25.561.559
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	**32.000.000**	**6.438.441**	**20,12**	**25.561.559**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	1.703.919.562	19,73	6.934.080.438
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	1.703.919.562	19,73	6.934.080.438
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	**8.638.000.000**	**1.703.919.562**	**19,73**	**6.934.080.438**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	111.170.000	23,20	368.070.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	111.170.000	23,20	368.070.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	**460.200.000**	**108.450.000**	**23,57**	**351.750.000**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	**19.040.000**	**2.720.000**	**14,29**	**16.320.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	4.081.899.524	18,17	18.384.649.476
5.1.2.1	Belanja Barang	4.782.056.000	826.921.230	17,29	3.955.134.770
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.782.056.000	826.921.230	17,29	3.955.134.770
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	**310.856.000**	**77.426.500**	**24,91**	**233.429.500**
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**389.423.000**	**131.051.730**	**33,65**	**258.371.270**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	**399.172.000**	**117.812.500**	**29,51**	**281.359.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	**23.850.000**	**4.950.000**	**20,75**	**18.900.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	**45.000.000**	**10.197.500**	**22,66**	**34.802.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	**20.550.000**	**3.970.000**	**19,32**	**16.580.000**
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.734.555.000**	**481.513.000**	**27,76**	**1.253.042.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.380.890.000	1.330.888.080	14,19	8.050.001.920
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.893.807.000	1.254.898.999	15,90	6.638.908.001
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	**1.023.750.000**	**195.450.000**	**19,09**	**828.300.000**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	**5.030.020.000**	**661.845.000**	**13,16**	**4.368.175.000**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	**42.420.000**	**10.605.000**	**25**	**31.815.000**
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	**158.040.000**	**38.655.000**	**24,46**	**119.385.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	**34.200.000**	**8.550.000**	**25**	**25.650.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	**454.037.000**	**117.169.260**	**25,81**	**336.867.740**
	Belanja Jasa Tenaga Supir	**34.200.000**	**9.326.550**	**27,27**	**24.873.450**
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	**184.840.000**	**21.210.000**	**11,47**	**163.630.000**
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	**6.300.000**	**0**	**0**	**6.300.000**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	**25.100.000**	**9.950.000**	**39,64**	**15.150.000**
	Belanja Tagihan Telepon	**140.000.000**	**11.647.803**	**8,32**	**128.352.197**
	Belanja Tagihan Air	**30.000.000**	**1.707.400**	**5,69**	**28.292.600**
	Belanja Tagihan Listrik	**430.000.000**	**91.302.776**	**21,23**	**338.697.224**
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	**18.550.000**	**4.635.000**	**24,99**	**13.915.000**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	**28.350.000**	**2.728.000**	**9,62**	**25.622.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	28.239.081	10,58	238.643.919
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	**105.444.000**	**25.776.704**	**24,45**	**79.667.296**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	**5.078.000**	**1.094.390**	**21,55**	**3.983.610**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	**6.361.000**	**1.367.987**	**21,51**	**4.993.013**
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.500.000	9.750.000	18,57	42.750.000
	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	**52.500.000**	**9.750.000**	**18,57**	**42.750.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	20.000.000	20,90	75.700.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	**75.700.000**	**0**	**0**	**75.700.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	0	0	520.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	515.000.000	18.000.000	3,50	497.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**388.000.000**	**18.000.000**	**4,64**	**370.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	**77.000.000**	**0**	**0**	**77.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	661.650.000	142.803.000	21,58	518.847.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.650.000	87.803.000	24,28	273.847.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	**10.600.000**	**0**	**0**	**10.600.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	**221.650.000**	**64.093.000**	**28,92**	**157.557.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	**44.400.000**	**12.525.000**	**28,21**	**31.875.000**
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	**65.000.000**	**11.185.000**	**17,21**	**53.815.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	55.000.000	18,33	245.000.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**300.000.000**	**55.000.000**	**18,33**	**245.000.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.414.453.000	1.781.287.214	24,02	5.633.165.786
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.414.453.000	1.781.287.214	24,02	5.633.165.786
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	**6.691.453.000**	**1.590.587.214**	**23,77**	**5.100.865.786**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	**723.000.000**	**190.700.000**	**26,38**	**532.300.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**227.500.000**	**0**	**0**	**227.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	4.205.000.000	9,82	38.610.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	4.205.000.000	9,82	38.610.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	4.205.000.000	9,82	38.610.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	**42.815.000.000**	**4.205.000.000**	**9,82**	**38.610.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**511.339.000**	**64,20**	**285.111.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	511.339.000	64,32	283.661.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	49.839.000	44,90	61.161.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	49.839.000	44,90	61.161.000
	Belanja Modal Mebel	**50.000.000**	**49.839.000**	**99,68**	**161.000**
	Belanja Modal Alat Pendingin	**61.000.000**	**0**	**0**	**61.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	0	0	12.000.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	0	0	12.000.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**12.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	0	0	102.000.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.000.000	0	0	84.000.000
	Belanja Modal Personal Computer	**84.000.000**	**0**	**0**	**84.000.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000	0	0	18.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
	Belanja Modal Buku Umum	**1.450.000**	**0**	**0**	**1.450.000**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**11.833.166.387**	**14,33**	**70.750.900.613**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(11.833.166.387)**	**100**	**11.833.166.387**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(11.833.166.387)**	**100**	**11.833.166.387**

Semarang, 31 Maret 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.034.927.863,-,- dengan Presentasi 19.90 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.081.899.524,- dengan Presentasi 18.17 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.205.000.000,- dengan Presentasi 9.82 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 511.339.000,- dengan Presentasi 64.20% yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 511.339.000,- dengan Presentasi 64.32 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**11.833.166.387**	**70.750.900.613**	**14,33**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**4.757.186.735**	**16.636.633.265**	**22,24**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**255.563.316**	**678.092.684**	**27,37**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	170.551.160	363.104.840,00	31,96
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	85.012.156	314.987.844,00	21,25
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**3.096.326.719**	**12.323.981.281**	**20,08**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	2.923.757.863	11.849.070.137,00	19,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	132.859.656	425.120.344,00	23,81
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	18.812.400	21.187.600,00	47,03
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	2.442.800	3.057.200,00	44,41
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	14.482.500	25.517.500,00	36,21
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**-**	**50.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**381.794.631**	**1.358.061.369**	**21,94**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	10.197.500	34.802.500,00	22,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	26.899.000	93.101.000,00	22,42
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	77.426.500	233.429.500,00	24,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	26.117.500	13.882.500,00	65,29
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	4.635.000	15.365.000,00	23,18
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	207.409.475	742.590.525,00	21,83
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	29.109.656	224.890.344,00	11,46
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**511.339.000**	**283.661.000**	**64,32**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	49.839.000	161.000,00	99,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-	175.000.000,00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**366.632.069**	**1.248.367.931**	**22,70**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	45.117.613	144.882.387,00	23,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	104.657.979	495.342.021,00	17,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	216.856.477	608.143.523,00	26,29
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**145.531.000**	**544.469.000**	**21,09**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	121.821.000	428.179.000,00	22,15
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	11.185.000	53.815.000,00	17,21
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	12.525.000	52.475.000,00	19,27
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**63.156.854.000**	**5.992.018.082**	**47.164.835.918**	**11,27**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**152.156.734**	**232.843.266**	**39,52**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	11.698.078	103.301.922,00	10,17
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	140.458.656	129.541.344,00	52,02
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**42.693.328**	**130.306.672**	**24,68**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	42.693.328	130.306.672,00	24,68
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**3.507.679.622**	**20.763.720.378**	**14,45**

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	27.533.788	5.042.466.212,00	0,54
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	1.412.298.948	5.562.701.052,00	20,25
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	2.067.846.886	10.158.553.114,00	16,91
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**2.289.488.398**	**26.037.765.602**	**8,08**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	2.289.488.398	26.037.765.602,00	8,08
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**323.893.825**	**3.794.355.175**	**7,86**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**49.016.662**	**450.983.338**	**9,80**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	38.595.162	101.404.838,00	27,57
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	10.421.500	349.578.500,00	2,89
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**274.877.163**	**3.343.371.837**	**7,60**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	274.877.163	3.343.371.837,00	7,60
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**97.198.743**	**997.801.257**	**8,88**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**97.198.743**	**997.801.257**	**8,88**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	97.198.743	997.801.257,00	8,88
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**136.566.650**	**243.433.350**	**35,94**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**136.566.650**	**243.433.350**	**35,94**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	136.566.650	243.433.350,00	35,94
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**136.625.650**	**540.374.350**	**20,18**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**136.625.650**	**540.374.350**	**20,18**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	103.926.650	496.073.350,00	17,32
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	32.699.000	44.301.000,00	42,47
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**141.616.825**	**427.727.175**	**24,87**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**141.616.825**	**427.727.175**	**24,87**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	113.243.000	108.218.000,00	51,13
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	14.718.825	302.394.175,00	4,64
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**248.059.877**	**945.940.123**	**20,78**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**248.059.877**	**945.940.123**	**20,78**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	248.059.877	945.940.123,00	20,78
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**11.833.166.387**	**70.750.900.613**	**14,33**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN FEBRUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Februari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Februari 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Februari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 28 Februari 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**4.601.624.887**	**5,57**	**77.982.442.113**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**4.140.124.887**	**5,06**	**77.647.492.113**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	2.030.417.091	13,31	13.221.650.909
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	815.727.300	13,30	5.319.100.700
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	597.996.940	13,77	3.745.097.060
	Belanja Gaji Pokok PNS	**4.343.094.000**	**597.996.940**	**13,77**	**3.745.097.060**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	52.840.608	11,28	415.417.392
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	**468.258.000**	**52.840.608**	**11,28**	**415.417.392**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	30.980.000	13,80	193.440.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	**224.420.000**	**30.980.000**	**13,80**	**193.440.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	8.795.000	7,94	101.945.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	**110.740.000**	**8.795.000**	**7,94**	**101.945.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	22.075.000	16,16	114.565.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	**136.640.000**	**22.075.000**	**16,16**	**114.565.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	31.140.600	12,91	210.051.400
	Belanja Tunjangan Beras PNS	**241.192.000**	**31.140.600**	**12,91**	**210.051.400**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	808.453	3,95	19.642.547
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	**20.451.000**	**808.453**	**3,95**	**19.642.547**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	8.544	0,67	1.265.456
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	**1.274.000**	**8.544**	**0,67**	**1.265.456**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	65.341.384	11,97	480.417.616
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	**545.759.000**	**65.341.384**	**11,97**	**480.417.616**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	1.435.193	13,05	9.564.807
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	**11.000.000**	**1.435.193**	**13,05**	**9.564.807**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	4.305.578	13,45	27.694.422
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	**32.000.000**	**4.305.578**	**13,45**	**27.694.422**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	1.139.669.791	13,19	7.498.330.209
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	1.139.669.791	13,19	7.498.330.209
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	**8.638.000.000**	**1.139.669.791**	**13,19**	**7.498.330.209**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	75.020.000	15,65	404.220.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	75.020.000	15,65	404.220.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	**460.200.000**	**72.300.000**	**15,71**	**387.900.000**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	**19.040.000**	**2.720.000**	**14,29**	**16.320.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	2.109.707.796	9,39	20.356.841.204
5.1.2.1	Belanja Barang	4.782.056.000	451.063.255	9,43	4.330.992.745
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.782.056.000	451.063.255	9,43	4.330.992.745
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	**310.856.000**	**52.125.500**	**16,77**	**258.730.500**
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**389.423.000**	**88.041.255**	**22,61**	**301.381.745**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	**399.172.000**	**42.053.000**	**10,54**	**357.119.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	**23.850.000**	**2.850.000**	**11,95**	**21.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	**45.000.000**	**5.947.500**	**13,22**	**39.052.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	**20.550.000**	**3.970.000**	**19,32**	**16.580.000**
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.734.555.000**	**256.076.000**	**14,76**	**1.478.479.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.380.890.000	658.791.354	7,02	8.722.098.646
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.893.807.000	620.029.392	7,85	7.273.777.608
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	**1.023.750.000**	**53.600.000**	**5,24**	**970.150.000**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	**5.030.020.000**	**297.090.000**	**5,91**	**4.732.930.000**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	**42.420.000**	**7.070.000**	**16,67**	**35.350.000**
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	**158.040.000**	**25.770.000**	**16,31**	**132.270.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	**34.200.000**	**5.700.000**	**16,67**	**28.500.000**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	**254.000.000**	**48.319.580**	**19,02**	**205.680.420**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	**454.037.000**	**79.740.840**	**17,56**	**374.296.160**
	Belanja Jasa Tenaga Supir	**34.200.000**	**6.217.700**	**18,18**	**27.982.300**
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	**184.840.000**	**14.140.000**	**7,65**	**170.700.000**
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	**6.300.000**	**0**	**0**	**6.300.000**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	**25.100.000**	**5.700.000**	**22,71**	**19.400.000**
	Belanja Tagihan Telepon	**140.000.000**	**7.748.198**	**5,53**	**132.251.802**
	Belanja Tagihan Air	**30.000.000**	**1.125.600**	**3,75**	**28.874.400**
	Belanja Tagihan Listrik	**430.000.000**	**63.357.974**	**14,73**	**366.642.026**
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	**18.550.000**	**3.090.000**	**16,66**	**15.460.000**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	**28.350.000**	**1.359.500**	**4,80**	**26.990.500**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	18.761.962	7,03	248.121.038
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	**105.444.000**	**17.125.886**	**16,24**	**88.318.114**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	**5.078.000**	**727.145**	**14,32**	**4.350.855**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	**6.361.000**	**908.931**	**14,29**	**5.452.069**
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.500.000	0	0	52.500.000
	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	**52.500.000**	**0**	**0**	**52.500.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	20.000.000	20,90	75.700.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**0**
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	**75.700.000**	**0**	**0**	**75.700.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	0	0	520.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	515.000.000	0	0	515.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**388.000.000**	**0**	**0**	**388.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	**77.000.000**	**0**	**0**	**77.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	661.650.000	62.733.000	9,48	598.917.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.650.000	31.133.000	8,61	330.517.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	**10.600.000**	**0**	**0**	**10.600.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	**221.650.000**	**27.273.000**	**12,30**	**194.377.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	**44.400.000**	**1.950.000**	**4,39**	**42.450.000**
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	**65.000.000**	**1.910.000**	**2,94**	**63.090.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	31.600.000	10,53	268.400.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**300.000.000**	**31.600.000**	**10,53**	**268.400.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.414.453.000	937.120.187	12,64	6.477.332.813
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.414.453.000	937.120.187	12,64	6.477.332.813
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	**6.691.453.000**	**937.120.187**	**14**	**5.754.332.813**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	**723.000.000**	**0**	**0**	**723.000.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**227.500.000**	**0**	**0**	**227.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	**42.815.000.000**	**0**	**0**	**42.815.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**461.500.000**	**57,94**	**334.950.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	461.500.000	58,05	333.500.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	461.500.000	80,96	108.500.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	**570.000.000**	**461.500.000**	**80,96**	**108.500.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	0	0	111.000.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	0	0	111.000.000
	Belanja Modal Mebel	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
	Belanja Modal Alat Pendingin	**61.000.000**	**0**	**0**	**61.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	0	0	12.000.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	0	0	12.000.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**12.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	0	0	102.000.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.000.000	0	0	84.000.000
	Belanja Modal Personal Computer	**84.000.000**	**0**	**0**	**84.000.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000	0	0	18.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
	Belanja Modal Buku Umum	**1.450.000**	**0**	**0**	**1.450.000**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**4.601.624.887**	**5,57**	**77.982.442.113**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(4.601.624.887)**	**100**	**4.601.624.887**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(4.601.624.887)**	**100**	**4.601.624.887**

Semarang, 28 Februari 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.030.417.091,- dengan Presentasi 13.31 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.109.707.796,- dengan Presentasi 9.39 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 461.500.000,- dengan Presentasi 57.94 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 461.500.000,- dengan Presentasi 58.05 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**4.601.624.887**	**77.982.442.113**	**5,57**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**3.200.224.688**	**18.193.595.312**	**14,96**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**156.696.932**	**776.959.068**	**16,78**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	95.046.828	438.609.172,00	17,81
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	61.650.104	338.349.896,00	15,41
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**2.067.372.895**	**13.352.935.105**	**13,41**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	1.955.397.091	12.817.430.909,00	13,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	88.573.104	469.406.896,00	15,87
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	16.488.400	23.511.600,00	41,22
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3.971.500	28.500,00	99,29
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	1.692.800	3.807.200,00	30,78
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	1.250.000	38.750.000,00	3,13
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**-**	**50.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**201.145.089**	**1.538.710.911**	**11,56**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	5.947.500	39.052.500,00	13,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	14.418.000	105.582.000,00	12,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	52.125.500	258.730.500,00	16,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	7.222.500	32.777.500,00	18,06
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	3.090.000	16.910.000,00	15,45
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	101.088.485	848.911.515,00	10,64
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	17.253.104	236.746.896,00	6,79
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**461.500.000**	**333.500.000**	**58,05**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	461.500.000	108.500.000,00	80,96
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-	175.000.000,00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**249.417.272**	**1.365.582.728**	**15,44**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	29.411.742	160.588.258,00	15,48
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	72.231.772	527.768.228,00	12,04
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	147.773.758	677.226.242,00	17,91
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**64.092.500**	**625.907.500**	**9,29**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	60.232.500	489.767.500,00	10,95
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	1.910.000	63.090.000,00	2,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	1.950.000	63.050.000,00	3,00
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**721.024.943**	**52.435.629.057**	**1,36**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**100.257.656**	**284.742.344**	**26,04**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	8.269.052	106.730.948,00	7,19
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	91.988.604	178.011.396,00	34,07
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**26.564.052**	**146.435.948**	**15,35**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	26.564.052	146.435.948,00	15,35

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.406.000**	**217.956.708**	**24.053.443.292**	**0,90**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	8.026.552	5.061.973.448,00	0,16
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	87.803.172	6.887.196.828,00	1,26
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	122.126.984	12.104.273.016,00	1,00
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**376.246.527**	**27.951.007.473**	**1,33**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	376.246.527	27.951.007.473,00	1,33
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**265.601.150**	**3.852.647.850**	**6,45**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**27.857.108**	**472.142.892**	**5,57**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	20.313.608	119.686.392,00	14,51
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	7.543.500	352.456.500,00	2,10
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**237.744.042**	**3.380.504.958**	**6,57**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	237.744.042	3.380.504.958,00	6,57
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**40.185.078**	**1.054.814.922**	**3,67**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**40.185.078**	**1.054.814.922**	**3,67**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	40.185.078	1.054.814.922,00	3,67
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**88.060.100**	**291.939.900**	**23,17**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**88.060.100**	**291.939.900**	**23,17**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	88.060.100	291.939.900,00	23,17
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**57.185.100**	**619.814.900**	**8,45**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**57.185.100**	**619.814.900**	**8,45**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	38.110.100	561.889.900,00	6,35
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	19.075.000	57.925.000,00	24,77
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**99.839.550**	**469.504.450**	**17,54**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**99.839.550**	**469.504.450**	**17,54**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	75.194.000	146.267.000,00	33,95
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	13.655.000	17.115.000,00	44,38
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	10.990.550	306.122.450,00	3,47
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**129.504.278**	**1.064.495.722**	**10,85**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**129.504.278**	**1.064.495.722**	**10,85**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	129.504.278	1.064.495.722,00	10,85
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**4.601.624.887**	**77.982.442.113**	**5,57**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN JANUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Bulan Januari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Januari 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 bulan Januari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.
* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 1 Januari s.d 31 Januari 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**82.584.067.000**	**1.802.974.501**	**2,18**	**80.781.092.499**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**81.787.617.000**	**1.802.974.501**	**2,20**	**79.984.642.499**
5.1.1	Belanja Pegawai	15.252.068.000	988.141.036	6,48	14.263.926.964
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.828.000	412.577.224	6,73	5.722.250.776
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.094.000	302.644.120	6,97	4.040.449.880
	Belanja Gaji Pokok PNS	**4.343.094.000**	**302.644.120**	**6,97**	**4.040.449.880**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	468.258.000	26.480.552	5,66	441.777.448
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	**468.258.000**	**26.480.552**	**5,66**	**441.777.448**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	15.490.000	6,90	208.930.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	**224.420.000**	**15.490.000**	**6,90**	**208.930.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.740.000	4.660.000	4,21	106.080.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	**110.740.000**	**4.660.000**	**4,21**	**106.080.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	136.640.000	11.220.000	8,21	125.420.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	**136.640.000**	**11.220.000**	**8,21**	**125.420.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.192.000	15.715.140	6,52	225.476.860
	Belanja Tunjangan Beras PNS	**241.192.000**	**15.715.140**	**6,52**	**225.476.860**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.451.000	402.716	1,97	20.048.284
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	**20.451.000**	**402.716**	**1,97**	**20.048.284**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.274.000	4.464	0,35	1.269.536
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	**1.274.000**	**4.464**	**0,35**	**1.269.536**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	545.759.000	33.054.848	6,06	512.704.152
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	**545.759.000**	**33.054.848**	**6,06**	**512.704.152**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	726.346	6,60	10.273.654
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	**11.000.000**	**726.346**	**6,60**	**10.273.654**
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	2.179.038	6,81	29.820.962
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	**32.000.000**	**2.179.038**	**6,81**	**29.820.962**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.638.000.000	575.563.812	6,66	8.062.436.188
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.638.000.000	575.563.812	6,66	8.062.436.188
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	**8.638.000.000**	**575.563.812**	**6,66**	**8.062.436.188**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	0	0	479.240.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	0	0	479.240.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	**460.200.000**	**0**	**0**	**460.200.000**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	**19.040.000**	**0**	**0**	**19.040.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	814.833.465	3,63	21.651.715.535
5.1.2.1	Belanja Barang	4.782.056.000	191.691.800	4,01	4.590.364.200
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.782.056.000	191.691.800	4,01	4.590.364.200
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	**310.856.000**	**27.620.000**	**8,89**	**283.236.000**
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**389.423.000**	**50.740.600**	**13,03**	**338.682.400**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	**399.172.000**	**19.018.700**	**4,76**	**380.153.300**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	**23.850.000**	**100.000**	**0,42**	**23.750.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	**45.000.000**	**5.947.500**	**13,22**	**39.052.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	**20.550.000**	**3.970.000**	**19,32**	**16.580.000**
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.734.555.000**	**84.295.000**	**4,86**	**1.650.260.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.380.890.000	299.307.780	3,19	9.081.582.220
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.893.807.000	290.603.267	3,68	7.603.203.733
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	**1.023.750.000**	**6.100.000**	**0,60**	**1.017.650.000**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	**5.030.020.000**	**146.231.554**	**2,91**	**4.883.788.446**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	**42.420.000**	**3.535.000**	**8,33**	**38.885.000**
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	**158.040.000**	**12.885.000**	**8,15**	**145.155.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	**34.200.000**	**2.850.000**	**8,33**	**31.350.000**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	**254.000.000**	**25.949.500**	**10,22**	**228.050.500**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.240.000	0	0	479.240.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	479.240.000	0	0	479.240.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	**460.200.000**	**0**	**0**	**460.200.000**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	**19.040.000**	**0**	**0**	**19.040.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.466.549.000	814.833.465	3,63	21.651.715.535
5.1.2.1	Belanja Barang	4.782.056.000	191.691.800	4,01	4.590.364.200
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.782.056.000	191.691.800	4,01	4.590.364.200
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	**310.856.000**	**27.620.000**	**8,89**	**283.236.000**
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	**7.650.000**	**0**	**0**	**7.650.000**
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	**48.000.000**	**0**	**0**	**48.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**389.423.000**	**50.740.600**	**13,03**	**338.682.400**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	**399.172.000**	**19.018.700**	**4,76**	**380.153.300**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	**23.850.000**	**100.000**	**0,42**	**23.750.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	**45.000.000**	**5.947.500**	**13,22**	**39.052.500**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	**20.550.000**	**3.970.000**	**19,32**	**16.580.000**
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**1.800.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.734.555.000**	**84.295.000**	**4,86**	**1.650.260.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	9.380.890.000	299.307.780	3,19	9.081.582.220
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	7.893.807.000	290.603.267	3,68	7.603.203.733
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	**1.023.750.000**	**6.100.000**	**0,60**	**1.017.650.000**
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	**5.030.020.000**	**146.231.554**	**2,91**	**4.883.788.446**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	**42.420.000**	**3.535.000**	**8,33**	**38.885.000**
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	**158.040.000**	**12.885.000**	**8,15**	**145.155.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	**34.200.000**	**2.850.000**	**8,33**	**31.350.000**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	**254.000.000**	**25.949.500**	**10,22**	**228.050.500**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	**454.037.000**	**42.312.420**	**9,32**	**411.724.580**
	Belanja Jasa Tenaga Supir	**34.200.000**	**3.108.850**	**9,09**	**31.091.150**
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	**184.840.000**	**7.070.000**	**3,82**	**177.770.000**
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	**6.300.000**	**0**	**0**	**6.300.000**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	**25.100.000**	**2.100.000**	**8,37**	**23.000.000**
	Belanja Tagihan Telepon	**140.000.000**	**3.380.523**	**2,41**	**136.619.477**
	Belanja Tagihan Air	**30.000.000**	**162.800**	**0,54**	**29.837.200**
	Belanja Tagihan Listrik	**430.000.000**	**33.372.620**	**7,76**	**396.627.380**
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	**18.550.000**	**1.545.000**	**8,33**	**17.005.000**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	**28.350.000**	**0**	**0**	**28.350.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.883.000	8.704.513	3,26	258.178.487
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	**105.444.000**	**7.944.318**	**7,53**	**97.499.682**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	**5.078.000**	**337.865**	**6,65**	**4.740.135**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	**6.361.000**	**422.330**	**6,64**	**5.938.670**
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	**150.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.500.000	0	0	52.500.000
	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	**52.500.000**	**0**	**0**	**52.500.000**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.700.000	0	0	95.700.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	**75.700.000**	**0**	**0**	**75.700.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.000.000	0	0	520.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**250.000.000**	**0**	**0**	**250.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	515.000.000	0	0	515.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**388.000.000**	**0**	**0**	**388.000.000**
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	**77.000.000**	**0**	**0**	**77.000.000**
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000	0	0	37.000.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	**37.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	661.650.000	39.990.000	6,04	621.660.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.650.000	18.590.000	5,14	343.060.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	**10.600.000**	**0**	**0**	**10.600.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	**221.650.000**	**14.730.000**	**6,65**	**206.920.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	**44.400.000**	**1.950.000**	**4,39**	**42.450.000**
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	**65.000.000**	**1.910.000**	**2,94**	**63.090.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	21.400.000	7,13	278.600.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**300.000.000**	**21.400.000**	**7,13**	**278.600.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.414.453.000	283.843.885	3,83	7.130.609.115
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.414.453.000	283.843.885	3,83	7.130.609.115
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	**6.691.453.000**	**283.843.885**	**4,24**	**6.407.609.115**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	**723.000.000**	**0**	**0**	**723.000.000**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.500.000	0	0	227.500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**227.500.000**	**0**	**0**	**227.500.000**
5.1.5	Belanja Hibah	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.254.000.000	0	0	1.254.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	614.000.000	0	0	614.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**614.000.000**	**0**	**0**	**614.000.000**
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	640.000.000	0	0	640.000.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**640.000.000**	**0**	**0**	**640.000.000**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42.815.000.000	0	0	42.815.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	**42.815.000.000**	**0**	**0**	**42.815.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**796.450.000**	**0**	**0**	**796.450.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.000.000	0	0	795.000.000
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	570.000.000	0	0	570.000.000
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	570.000.000	0	0	570.000.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	**570.000.000**	**0**	**0**	**570.000.000**
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.000.000	0	0	111.000.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	111.000.000	0	0	111.000.000
	Belanja Modal Mebel	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
	Belanja Modal Alat Pendingin	**61.000.000**	**0**	**0**	**61.000.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000	0	0	12.000.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000	0	0	12.000.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**12.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.000.000	0	0	102.000.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.000.000	0	0	84.000.000
	Belanja Modal Personal Computer	**84.000.000**	**0**	**0**	**84.000.000**
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000	0	0	18.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
	Belanja Modal Buku Umum	**1.450.000**	**0**	**0**	**1.450.000**
	Jumlah Belanja	**82.584.067.000**	**1.802.974.501**	**2,18**	**80.781.092.499**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(1.802.974.501)**	**100**	**1.802.974.501**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(1.802.974.501)**	**100**	**1.802.974.501**

Semarang, 31 Januari 2023
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

PRINTED BY GRMS JATENG

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 82.584.067.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.787.617.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 796.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.252.068.000,- dan realisasi sebesar Rp. 988.141.036,- dengan Presentasi 6.48 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 22.466.549.000,- dan realisasi sebesar Rp. 814.833.465,- dengan Presentasi 3.63 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 42.815.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 796.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**82.584.067.000**	**1.802.974.501**	**80.781.092.499**	**2,18**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**21.393.820.000**	**1.373.016.756**	**20.020.803.244**	**6,42**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**933.656.000**	**102.012.828**	**831.643.172**	**10,93**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	533.656.000	56.182.276	477.473.724,00	10,53
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	45.830.552	354.169.448,00	11,46
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.420.308.000**	**1.008.620.488**	**14.411.687.512**	**6,54**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.772.828.000	988.141.036	13.784.686.964,00	6,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557.980.000	7.456.552	550.523.448,00	1,34
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	11.772.900	28.227.100,00	29,43
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	-	4.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000	-	5.500.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.000.000	1.250.000	38.750.000,00	3,13
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	150.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**50.000.000**	**-**	**50.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.739.856.000**	**93.753.037**	**1.646.102.963**	**5,39**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	5.947.500	39.052.500,00	13,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	14.418.000	105.582.000,00	12,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.856.000	27.620.000	283.236.000,00	8,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	3.422.500	36.577.500,00	8,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	1.545.000	18.455.000,00	7,73
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	33.343.485	916.656.515,00	3,51
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.000.000	7.456.552	246.543.448,00	2,94
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**795.000.000**	**-**	**795.000.000**	**-**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000	-	570.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-	175.000.000,00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.615.000.000**	**128.640.403**	**1.486.359.597**	**7,97**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	13.605.871	176.394.129,00	7,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	36.915.943	563.084.057,00	6,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.000.000	78.118.589	746.881.411,00	9,47
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**690.000.000**	**39.990.000**	**650.010.000**	**5,80**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	36.130.000	513.870.000,00	6,57
	Sub Kegiatan Mebel	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	1.910.000	63.090.000,00	2,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.000.000	1.950.000	63.050.000,00	3,00
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**53.156.654.000**	**226.316.768**	**52.930.337.232**	**0,43**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**385.000.000**	**32.657.078**	**352.342.922**	**8,48**
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	115.000.000	4.840.026	110.159.974,00	4,21
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	270.000.000	27.817.052	242.182.948,00	10,30
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**173.000.000**	**6.320.276**	**166.679.724**	**3,65**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	173.000.000	6.320.276	166.679.724,00	3,65

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**24.271.400.000**	**80.474.228**	**24.190.925.772**	**0,33**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.070.000.000	4.028.276	5.065.971.724,00	0,08
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.975.000.000	35.195.176	6.939.804.824,00	0,50
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.226.400.000	41.250.776	12.185.149.224,00	0,34
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**28.327.254.000**	**106.865.186**	**28.220.388.814**	**0,38**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	28.327.254.000	106.865.186	28.220.388.814,00	0,38
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.118.249.000**	**35.495.375**	**4.082.753.625**	**0,86**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**500.000.000**	**13.607.054**	**486.392.946**	**2,72**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	140.000.000	12.107.054	127.892.946,00	8,65
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali Permukiman Kumuh	360.000.000	1.500.000	358.500.000,00	0,42
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**3.618.249.000**	**21.888.321**	**3.596.360.679**	**0,60**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	3.618.249.000	21.888.321	3.596.360.679,00	0,60
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.095.000.000**	**12.806.304**	**1.082.193.696**	**1,17**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**1.095.000.000**	**12.806.304**	**1.082.193.696**	**1,17**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.095.000.000	12.806.304	1.082.193.696,00	1,17
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**39.123.550**	**340.876.450**	**10,30**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**380.000.000**	**39.123.550**	**340.876.450**	**10,30**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	39.123.550	340.876.450,00	10,30
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**677.000.000**	**23.063.550**	**653.936.450**	**3,41**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**677.000.000**	**23.063.550**	**653.936.450**	**3,41**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	15.506.550	584.493.450,00	2,58
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.000.000	7.557.000	69.443.000,00	9,81
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**569.344.000**	**33.870.275**	**535.473.725**	**5,95**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	**569.344.000**	**33.870.275**	**535.473.725**	**5,95**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	221.461.000	26.608.000	194.853.000,00	12,01
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	30.770.000	-	30.770.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	317.113.000	7.262.275	309.850.725,00	2,29
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.194.000.000**	**59.281.923**	**1.134.718.077**	**4,96**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**1.194.000.000**	**59.281.923**	**1.134.718.077**	**4,96**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.194.000.000	59.281.923	1.134.718.077,00	4,96
	JUMLAH	**82.584.067.000**	**1.802.974.501**	**80.781.092.499**	**2,18**

Dipindai dengan CamScanner